

**NASIONALISME KASHMIR  
SETELAH KEMERDEKAAN INDIA SAMPAI TAHUN 1990**



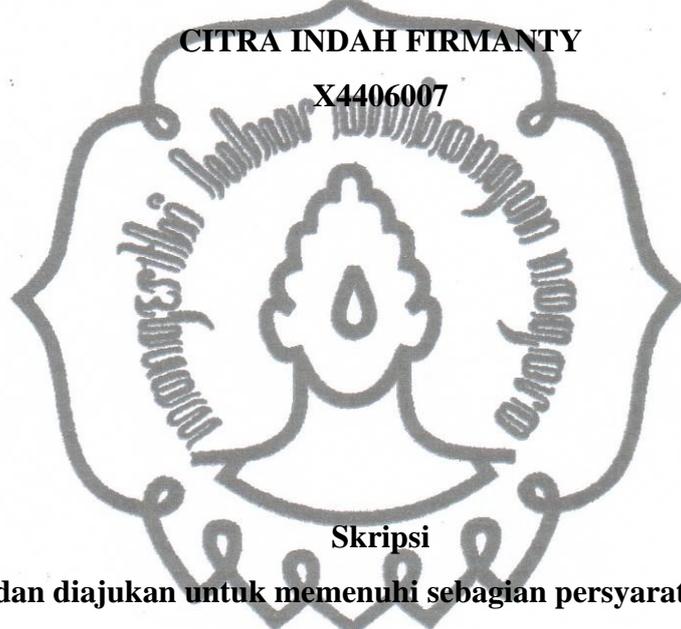
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**  
*commit to user*  
**2010**

**NASIONALISME KASHMIR  
SETELAH KEMERDEKAAN INDIA SAMPAI TAHUN 1990**

Oleh :

**CITRA INDAH FIRMANTY**

**X4406007**



**Skripsi**

**Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat  
gelar sarjana pendidikan Program Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**SURAKARTA**

*commit to user*  
**2010**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Surakarta, 27 Juli 2010.



Dra. Sutiya, M.Pd, M.Hum  
NIP. 195907078198612001

Musa Pelu, S.Pd, M.Pd  
NIP. 197304032006041025

*commit to user*

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta dan diterima untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2010

Tim Penguji Skripsi

Nama Terang

Tanda tangan

Ketua : Drs. Saiful Bachri, M.Pd

Sekretaris : Dra. Sri wahyuni, M.Pd

Anggota I : Dra. Sutiyah, M.Pd, M.Hum

Anggota II : Musa Pelu, S.Pd, M.Pd

Disahkan oleh

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sebelas Maret

Dekan,

Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M. Pd.

NIP. 19600727 198702 1 001

*commit to user*

## ABSTRAK

**Citra Indah Firmanty. NASIONALISME KASHMIR SETELAH KEMERDEKAAN INDIA SAMPAI TAHUN 1990.** Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2010.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Permasalahan yang terjadi di Kashmir dengan adanya pertikaian India dan Pakistan; (2) Faktor penyebab muncul gerakan nasionalisme Kashmir; (3) Perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990; (4) Hasil perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historis*) yaitu prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Langkah-langkah dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis historis. Teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman dalam interpretasi sejarah. Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul dengan pendekatan kerangka berpikir atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau teori politik, ekonomi dan sosial sehingga didapatkan suatu fakta sejarah yang dapat dipercaya kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Sejak kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947 Maha Raja Kashmir Hari Singh menghadapi dilema apakah bergabung dengan India atau Pakistan. Sejak awal rakyat Kashmir berkehendak ikut ke dalam Pakistan, karena secara historis, emosional, dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan yang sama agama, tetapi Maha Raja Hari Singh bersikap ragu-ragu sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir; (2) Munculnya gerakan nasionalisme Kashmir dilatarbelakangi oleh keinginan Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang merdeka. Intervensi India terhadap Kashmir dipersepsikan sebagai bentuk penjajahan setelah tidak dipenuhinya janji pemerintahan di New Delhi pada awal kemerdekaan untuk memberi otonomi penuh pada Jammu dan Kashmir; (3) Di Kashmir organisasi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan terpecah dan beragam. Dari segi tujuan, gerakan-gerakan perlawanan di Jammu dan Kashmir terbagi dua, yaitu : (a) pro-Azadi, yang menginginkan kemerdekaan penuh, dan (b) pro-Pakistan, kelompok yang menginginkan akses dengan Pakistan; (4) Hasil perjuangan nasionalisme Kashmir untuk bisa menjadi negara merdeka dan menentukan nasibnya sendiri sampai tahun 1990 belum terwujud. Memasuki tahun 1990 situasi politik di Kashmir semakin memanas. Pada bulan Januari 1990 tuntutan memisahkan diri dari India kembali menggema di Jammu dan Kashmir.

## ABSTRACT

**Citra Indah Firmanty. KASHMIR NATIONALITY AFTER INDIAN INDEPENDENCE UP TO 1990.** Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, July 2010.

The objective this studies are to find out: (1) the problem occurring in Kashmir in the presence of India-Pakistan dispute; (2) the cause factor Kashmir nationalism movement emerging; (3) the Kashmir nationalism's struggle after Indian independence to 1990; (4) the result of Kashmir nationalism's struggle after Indian independence to 1990.

This study employed a historical method, that is, the one deriving from the historian's procedure of work to produce the past story based on the traces abandoned by the past. The procedures of historical method include heuristic, criticism, interpretation, and historiography. Technique of collecting data employed was library study. The data source used was the written one. In line with the type of research, the technique of analyzing data used was historical analysis technique. It is the one emphasizing on the incisiveness of history interpretation. The procedure of analysis was done by classifying the data collected using framework and reference-frame approach involving various concepts or political, economical and social theories so that a reliable fact of history is obtained.

Considering the result of research, it can be concluded that: (1) since Indian Independence in 1947 the Great Lord of Kashmir Hari Singh encountered dilemma whether to join India or Pakistan. Since at the outset, Kashmir people want to join Pakistan, because historically, emotionally and culturally they are more adjacent to Pakistan with the same religion, but the King Hari Singh was in doubt so that it resulted in the Kashmir people's anger; (2) the Kashmir nationalism movement emerging was foreshadowed by the Kashmir's desire to determine its own faith as an independent country. Indian's intervention with Kashmir were perceived as the form of colonialism after the promise denial from the New Delhi government at the outset of independence to give full autonomy to Jammu and Kashmir; (3) in Kashmir, the struggle organizations to achieve independence are broken and varied. From the objective aspect, the resistance movement in Jammu and Kashmir is divided into two: (a) pro-Azadi, that want the fully independence, and (b) pro-Pakistan, the group that wants the accession with Pakistan; and (4) the result of Kashmir nationalism struggle to become an independent day and to determine its own fait has not been realized up to 1990. Entering 1990, the political situation in Kashmir was getting hotter. On January 1990 the demand for separating itself from India reverberated more in Jammu and Kashmir.

## MOTTO

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik lelaki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!.

(QS An-Nisaa : 75)

Hidup akan lebih mulia bila mental yang tertanam adalah "berani hidup" daripada "berani mati".

(Andrie Wongso)

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:*

- *Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat.*
- *Kakakku, mas Kukuh dan adikku (Agung dan Juwita) tersayang.*
- *Almamater.*

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

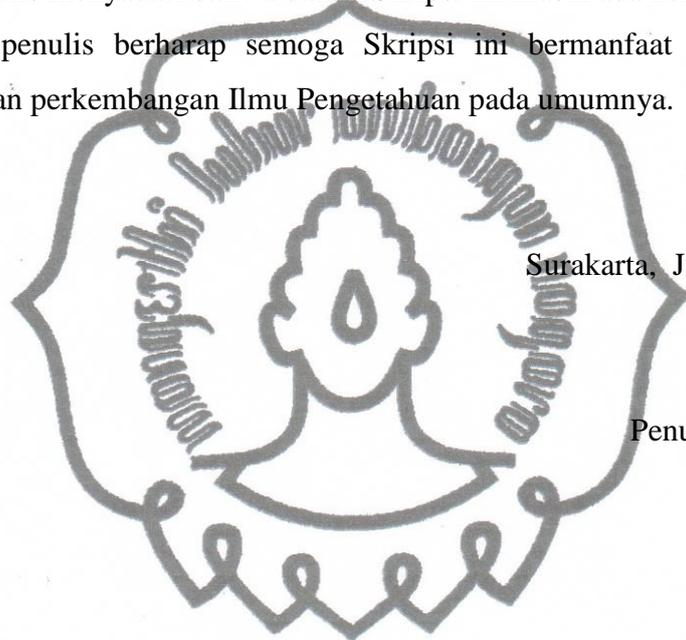
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lancar guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.

Hambatan dan rintangan yang dihadapi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini telah hilang berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan yang timbul dapat teratasi. Oleh karena itu disampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin untuk menyusun skripsi.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah menyetujui atas permohonan skripsi ini.
3. Ketua Program Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan pengarahan dan ijin atas penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Sutiyah, M.Pd, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Musa Pelu, S.Pd, M.Pd, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mencurahkan segenap kasih sayang yang tulus dan selalu memberikan motivasi kepada penulis.
7. Kakak dan Adik-adikku tersayang.
8. Heri Purwanto makasih buat semangatnya akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2006 terima kasih dukungannya selama ini.
10. Sahabat-sahabatku : Indri, Ste, Irma, dan Riana terima kasih atas hari-hari yang kelak pasti akan kita rindukan.

11. Keluarga besar kos mawar sari (mb. Yuyun, Sinun, Mpitt, Bunga, Chotim, Yanti, Iva, Endent, Dewi, Anik, Lisa dan Indi) terima kasih atas kebersamannya selama ini.
12. Foto copy CV Mandiri terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih ada kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Pengetahuan pada umumnya.



Surakarta, Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGAJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Nasionalisme .....	7
2. Perjuangan .....	14
B. Kerangka Berfikir .....	17
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
B. Metode Penelitian .....	19
C. Sumber Data .....	21
D. Teknik Pengumpulan Data .....	22
E. Teknik Analisis Data .....	23
F. Prosedur Penelitian .....	24

*commit to user*

## BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Permasalahan apa saja yang terjadi di Kashmir dengan adanya masalah India dan Pakistan .....	27
1. Letak geografis Kashmir .....	27
2. Sejarah Kashmir .....	28
3. Pentingnya Kashmir bagi India dan Pakistan .....	31
4. Masalah Kashmir .....	32
5. Perang India dan Pakistan .....	39
a. Perang India-Pakistan 1947 .....	39
b. Perang India-Pakistan 1965 .....	40
B. Muncul Gerakan Nasionalisme Kashmir .....	41
1. Latar Belakang Muncul Gerakan Nasionalisme Kashmir .....	41
2. Gerakan Nasionalisme Kashmir .....	44
C. Perjuangan Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990 .....	48
1. Kebangkitan Nasionalisme Kashmir .....	48
2. Perjuangan Nasionalisme Kashmir Sampai Tahun 1990 .....	52
a. Perjuangan tahun 1947-1954 .....	52
b. Perjuangan tahun 1954-1977 .....	54
c. Perjuangan tahun 1977-1990 .....	56
3. Tujuan Perjuangan Nasionalisme Kashmir.....	60
D. Hasil Perjuangan Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990 .....	63
<b>BAB V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	69
B. Implikasi .....	71
C. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN .....	76

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	
1. Peta Lokasi benua Asia .....	77
2. Peta Benua Asia .....	78
3. Peta kawasan Asia Selatan .....	79
4. Peta Kashmir .....	80
5. Sheikh Abdullah .....	81
6. Pertemuan Sheikh Abdullah Soal Kashmir .....	82
7. The Instrumen aksesi ke Uni India .....	83
8. Tempo 5 Mei 1990 .....	85
9. Tempo 22 Februari 1990 .....	90
10. Tempo 11 April 1992 .....	92
11. Deseret News 2 September tahun 1965 .....	94
12. Deseret News 22 September tahun 1965 .....	96
13. Jurnal .....	98
14. Surat Permohonan Izin Menyusun Skripsi .....	118

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarahnya, munculnya nasionalisme disebabkan oleh berbagai faktor pendorong dan terdiri dari berbagai dimensi. Penekanannya tergantung dari situasi dan kondisi setiap bangsa yang mendukungnya. Tumbuh dan berkembangnya nasionalisme disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor penyebabnya munculnya nasionalisme antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain berbeda, karena setiap bangsa mempunyai sejarah yang berbeda-beda. Misalnya kenangan akan kejayaan negara mereka yang telah lampau antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berbeda. Faktor-faktor penyebab tumbuhnya nasionalisme terdiri atas faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern tumbuhnya nasionalisme bisa karena faktor politik (penjajahan), faktor sosial, faktor ekonomis dan faktor budaya. Faktor ekstern seperti dogma dan ide pemikiran. Faktor-faktor tersebut dari waktu ke waktu dapat saja berubah. Misalnya, munculnya nasionalisme Indonesia pra kemerdekaan disebabkan faktor penjajahan kolonial, setelah merdeka berubah faktornya karena kesewenang-wenangan penguasa, korupsi, monopoli, dan ketidakadilan.

Keragaman perwujudan dan faktor-faktor penyebab nasionalisme dapat dilihat dalam tumbuh dan berkembangnya nasionalisme diberbagai negara. Konsep nasionalisme dalam arti modern berasal dari dunia barat. Nasionalisme mula-mula dibenihkan oleh golongan menengah Inggris yang tergabung dalam kelompok puritan kemudian berkembang ke Perancis dan Amerika Utara. Nasionalisme abad ke-18 itu telah melahirkan negara-negara kebangsaan (nation-state) di Eropa dengan menentukan batas-batasnya di satu pihak dan imperialisme di pihak lain.

Nasionalisme yang berkembang di Eropa itu juga berkembang di negara-negara luar Eropa, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Di Afrika, muncul nasionalisme berkaitan dengan proses penjajahan Barat. Bangsa Barat yang menjajah Afrika menerapkan praktik kolonial seperti diskriminasi dan

ketidakadilan antara kulit hitam, semi kulit hitam, dan penguasa atau masyarakat berkulit putih. Selain itu juga muncul kegelisahan di kalangan orang Afrika tentang pendidikan dan eksploitasi ekonomi. Dalam hal ini, nasionalisme Afrika muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan Barat yang telah merusak sendi-sendi kehidupan sosial budaya, ekonomi dan politik di benua itu. (Cahyo Budi Utomo, 1995:18)

Di negara-negara Asia, nasionalisme merupakan hasil yang sangat penting dari kekuasaan kolonial bangsa Barat. Nasionalisme Asia bila dikaitkan dengan praktek kolonialisme melahirkan coraknya yang tidak sama. Negara-negara yang diperintah dengan politik kolonial otonomi seperti Malaya melahirkan corak nasionalisme yang berbeda dengan yang diperintah dengan corak asosiasi seperti Indo Cina. sehingga corak nasionalisme di Malaya dan Indo Cina itu juga berbeda.

Timbulnya nasionalisme Malaya disebabkan adanya penjajahan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. Nasionalisme Malaya timbul karena Revolusi Nasional di Tiongkok (Dr. Sun Yat Sen) yang menggerakkan orang-orang Tionghoa di Malaya supaya bersikap keras, baik terhadap bangsa Inggris maupun terhadap bangsa Malaya yang dianggapnya rendah. Selain itu, timbulnya nasionalisme Malaya dikarenakan adanya kemerdekaan Mesir, karena Mesir dan Malaya adalah jajahan Inggris, dan keduanya adalah bangsa yang mayoritasnya beragama Islam. Nasib mereka adalah sama, tetapi Mesir telah merdeka dan Malaya tidak. Faktor lain yang menyebabkan munculnya nasionalisme di Malaya adalah adanya perjuangan nasionalisme di India.

Nasionalisme Indo Cina disebabkan adanya penindasan Perancis di Indo Cina (baik politis maupun ekonomi). Timbulnya Indo Cina karena kaum terpelajar yang telah mempelajari demokrasi dilarang mempraktekannya, perang Jepang-Rusia 1905 yang membangkitkan nasionalisme di seluruh Asia, serta Dalam Perang Dunia 1 Perancis mengirimkan orang-orang Indo Cina ( $\pm$  100.000 orang) ke Eropah sebagai tentara dan pekerja perang. Mereka ini kembali ke Indo-Cina dengan membawa paham-paham liberalisme. Itulah sebabnya Nasionalisme Indo

Cina muncul karena ingin menjadi negara yang merdeka, seperti halnya dengan Malaya.

Latar belakang munculnya nasionalisme Malaya dan Indo-China memang berbeda, tetapi sebenarnya mempunyai cita-cita yang sama yaitu ingin menjadi negara yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Mereka mempunyai cita-cita membentuk negara bangsa yang bersatu, merdeka dan demokratis yang menjamin kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Yang membedakan hanya cara-cara perjuangan mereka untuk bisa mencapai tujuan. Disamping Malaya dan Indo Cina, banyak sekali negara-negara di kawasan Asia yang pernah diperintah kolonial Barat. Mereka memperjuangkan juga negaranya agar terbebas dari penjajahan. Contohnya India dan Indonesia.

Pada saat India menerima usul status dominion Inggris. India di bagi menjadi dua yaitu India dan Pakistan. Ketika India dan Pakistan terbentuk pada 15 Agustus 1947. Kashmir tetap merdeka, tidak termasuk India dan Pakistan, tetapi Kashmir penting bagi India dan Pakistan. Masalah Kashmir menjadi isu besar dalam panggung politik Pakistan dan India sejak tahun 1947. Setelah lepas dari kekuasaan Inggris, Kashmir terjebak dalam pertikaian Pakistan dan India, karena keduanya sama-sama menginginkan Kashmir. Pertikaian itu menyebabkan munculnya nasionalisme etnik Kashmir karena Kashmir merasa menjadi negara yang terjajah dan tidak bisa menjadi negara yang bebas menentukan nasibnya sendiri.

Permasalahan di Kashmir berawal saat India dan Pakistan terbentuk menjadi negara merdeka. Inggris memberi kebebasan pada Kashmir Ingin bergabung dengan India atau Pakistan. Kashmir menghadapi dilema dengan pilihan yang diberikan Inggris. Hingga kemerdekaan India dan Pakistan diproklamasikan, Kashmir belum memutuskan untuk bergabung dengan salah satu negara tersebut. Kalau dilihat dari segi agama, Kashmir lebih cenderung bergabung dengan Pakistan, tetapi jika dilihat dari sejarahnya Maha Raja Kashmir beragama Hindhu maka Kashmir lebih cenderung bergabung dengan India. Pada perkembangan selanjutnya Maha Raja Hari Sigh memilih bergabung dengan India dan bersedia menandatangani dokumen *Instrument of Accession* yang berisi

pernyataan integrasi Kashmir ke dalam India karena India membantu Kashmir memadamkan pemberontakan yang terjadi di Kashmir, tetapi rakyat Kashmir tidak setuju dengan keputusan yang diambil Maha Raja Hari Singh jika bergabung dengan India karena sebagian besar rakyat Kashmir beragama Islam. Masalah Kashmir tidak hanya menjadi masalah antara rakyat Kashmir dengan India tetapi menjadi masalah negara India dengan Pakistan.

Kashmir mau bergabung dengan India, tetapi harus dengan otonomi khusus. Kashmir minta diberi kebebasan mengatur pemerintahannya sendiri, namun dalam prakteknya Kashmir tidak pernah lepas dari campur tangan pusat dan tidak pernah menikmati kebebasan dalam menjalankan kekuasaan. Sampai pada akhirnya Kashmir menuntut kemerdekaan. Kashmir ingin lepas dari campur tangan India dan Pakistan. Kemudian muncul gerakan nasionalisme etnik Kashmir.

Perjuangan nasionalisme etnik Kashmir mulai bangkit dari diri penduduk Kashmir, dengan tujuan agar Kashmir menjadi negara yang merdeka tanpa ada campur tangan India dan Pakistan. Para penduduk Kashmir meneruskan perjuangan politik mereka hingga tahun 1987 dengan mempertahankan hak mereka untuk merdeka dan memerintah melalui partai-partai politik, tetapi semua itu tidak mendatangkan hasil apapun. Pada tahun 1989, setelah menyaksikan usaha-usaha melalui perlembagaan, kehakiman dan demokrasi gagal, para pemuda Kashmir mengambil keputusan bahwa telah tiba waktunya untuk memulai perjuangan bersenjata (jihad). Memasuki tahun 1990 situasi politik di Kashmir semakin memanas. Pada bulan Januari 1990, tuntutan memisahkan diri dari India kembali menggema di Jammu dan Kashmir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara lebih mendalam serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“NASIONALISME KASHMIR SETELAH KEMERDEKAAN INDIA SAMPAI TAHUN 1990 ”**

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Permasalahan apa saja yang terjadi di Kashmir dengan adanya pertikaian India dan Pakistan?
2. Mengapa muncul gerakan nasionalisme Kashmir?
3. Bagaimana perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990?
4. Bagaimana hasil perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan :

1. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi di Kashmir dengan adanya pertikaian India dan Pakistan.
2. Untuk mengetahui mengapa muncul gerakan nasionalisme Kashmir.
3. Untuk mengetahui perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990.
4. Untuk mengetahui hasil perjuangan nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan yang ingin diperoleh dari suatu penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ni diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Menambah wawasan pemikiran dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya tentang nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990.

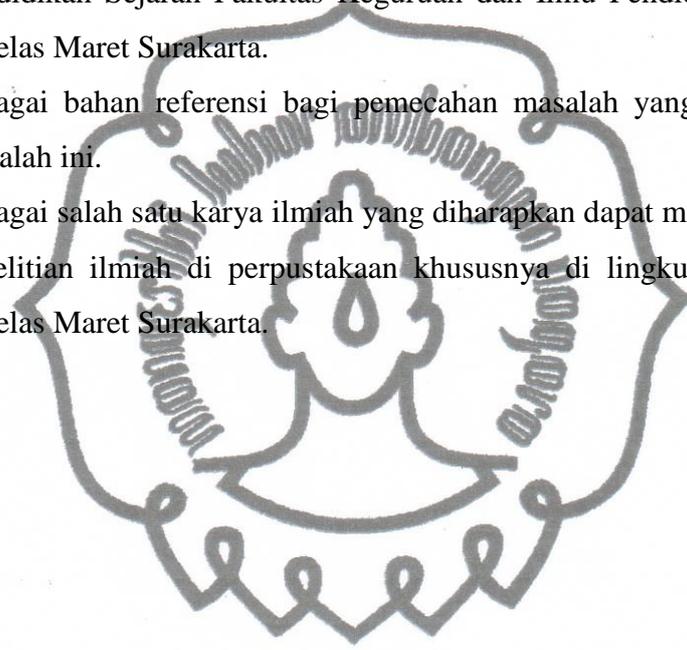
*commit to user*

- b. Bahan masukan kepada pembaca untuk digunakan sebagai wacana dan sumber data dalam bidang sejarah.

## 2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana kependidikan Program Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Sebagai bahan referensi bagi pemecahan masalah yang relevan dengan masalah ini.
- c. Sebagai salah satu karya ilmiah yang diharapkan dapat melengkapi koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan khususnya di lingkungan Universitas Sebelas Maret Surakarta.



## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Nasionalisme

###### a. Pengertian Nasionalisme

Pengertian Nasionalisme menurut F. Isjwara (1982 : 126) berasal dari bahasa latin “*nation*” yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, namun arti dan hakikat yang melekat pada nasionalisme sudah berubah menurut zaman dan tempat serta disesuaikan dengan ideologi penafsirannya. Dapat dikatakan bahwa nasionalisme adalah formalisasi ataupun rasionalisasi dari kesadaran nasional yang kemudian membentuk *nato* dalam arti politik yaitu negara nasional.

Suhartoyo Hardjosatoto (1985: 42) mendefinisikan nasionalisme sebagai kesadaran diri yang meningkat dan diwujudkan oleh kecintaan yang melimpah pada negeri dan bangsa sendiri, kadang-kadang disertai akibat yang mengecilkan arti dan sifat bangsa-bangsa lain. Menurut Taufik Abdullah (2001: 47) nasionalisme adalah sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara kita yang sebangsa dengan mereka dari bangsa lain, antara negara kita dengan negara mereka.

Menurut Hans Kohn yang dikutip oleh Cahyo Budi Utomo (1995 : 19), menyatakan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda dari bangsa-bangsa lainnya, yang terpenting adalah kemauan bersama dan hidup nyata. Kemauan itulah yang dinamakan nasionalisme, yakni suatu paham yang memberi ilham pada sebagian terbesar penduduk dan mewajibkan dirinya untuk mengilhami segenap anggota-anggotanya.

Pengertian nasionalisme yang dinyatakan oleh M. Hutauruk (1984 : 61) adalah “pikiran, perasaan dan kehendak hidup dalam suatu negara dengan *commit to user*”

masyarakat yang adil, makmur, dan solidaritas karena nasib dan pengalaman bersama”. Nasionalisme yang didefinisikan oleh Sartono Kartodirjo (1993 : 243) sebagai fenomena historis, politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Nasionalisme ini muncul dalam perjalanan sejarah suatu bangsa terhadap kondisi masyarakat yang kehilangan kemerdekaan politik dan kebebasan perekonomian sehingga menimbulkan penderitaan dalam lapangan sosial ekonomi serta terbongkarnya akar-akar kebudayaan. Kondisi ini akan menggerakkan masyarakat untuk berusaha melepaskan diri dari keterikatan dan penindasan tersebut.

Miriam Budiarto (1982 : 44) mendefinisikan Nasionalisme adalah suatu perasaan subyektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau *nation*. Menurut L Stoddard yang dikutip oleh DR. Badri Yatim (1999 : 59) nasionalisme adalah suatu keadaan jiwa dan suatu kepercayaan oleh sejumlah besar manusia perseorangan sehingga mereka membentuk suatu kebangsaan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, nasionalisme adalah faham kebangsaan yang diwujudkan dengan sikap atau tindakan kecintaan tinggi pada negeri dan bangsa sendiri dengan kesediaan memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya. Kesadaran rakyat Kashmir untuk merdeka terbentuk dari proses yang dialami di masa lalu. Membuktikan sikap kecintaan yang tinggi terhadap bangsanya dan rela berkorban apapun demi terwujudnya suatu negara yang merdeka yaitu negara Kashmir. Rasa kebangsaan muncul karena keyakinan rakyat Kashmir yang diwariskan secara turun temurun bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok-kelompok etnik lain di India.

#### **b. Cita-Cita Nasionalisme**

Nasionalisme sebagai manifestasi dari kesadaran nasional mengandung sebuah cita-cita atau ilham yang mendorong dan merangsang suatu bangsa untuk bersatu. Hertz yang dikutip oleh F. Isjwara (1982 : 127) menyebutkan ada empat macam cita-cita yang terkandung dalam nasionalisme yaitu: (1) Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang meliputi persatuan bidang politik, ekonomi,

sosial, agama, kebudayaan dan persekutuan serta adanya solidaritas; (2) Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional yang meliputi kebebasan dari penguasaan asing; (3) Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian (*separentenses*), pembedaan (*distinctivenses*); individualitas keaslian (*originality*) atau keistimewaan, dan (4) Perjuangan untuk mewujudkan perbedaan diantara bangsa-bangsa, yang meliputi perjuangan untuk memperoleh kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.

Cita-cita nasionalisme yang diutarakan oleh Hertz ini sesuai dengan cita-cita nasionalisme yang dimiliki, Kashmir berusaha untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari penguasaan India dan Pakistan yang sama-sama memperebutkan Kashmir.

### c. Unsur-Unsur Nasionalisme

Didalam nasionalisme terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya yang sangat penting untuk memperkuat nasionalisme dalam diri suatu bangsa. Menurut M. Hutauruk (1984: XV111) unsur-unsur penting nasionalisme adalah : (1) Kesetiaan mutlak, kesetiaan individu, kesetiaan tertinggi individu itu adalah pada nusa dan bangsa; (2) Kesadaran akan suatu panggilan; (3) Keyakinan akan suatu panggilan; (4) Harapan akan tercapainya sesuatu yang membahagiakan; (5) Hak hidup, hak merdeka dan hak atas harta benda yang berhasil dikumpulkan dengan jalan halal; (6) Kepribadian kolektif yang mengandung perasaan mesra sekeluarga, nasib serta tanggung jawab yang sama, persaudaraan dan kesetiaan di antara manusia itu; (7) Jiwa rakyat (*Volkgeist*) yang ada dalam tradisi, bahasa, ceritera dan nyayian rakyat, dan (8) Toleransi yang sebesar-besarnya terhadap satu sama lain.

Menurut Sartono Kartodirdjo yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo J.R (1996 : 40-41) bahwa nasionalisme akan tetap relevan untuk segala jaman asal didalamnya terkandung unsur-unsur : (1) Tetap menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; (2) Menjamin kebebasan individu ataupun kelompok; (3) Menjamin adanya kesamaan bagi setiap individu; (4) Menjamin terwujudnya individualitas, dan (5) Menjanjikan adanya prestasi, keunggulan bagi masa depan bangsa.

#### d. Bentuk-Bentuk Nasionalisme.

Soekarno membagi nasionalisme menjadi dua : (1) nasionalisme Barat dan, (2) nasionalisme Ketimuran (Soekarno, 1999 : 64). Nasionalisme Barat lahir dalam masa peralihan masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Nasionalisme yang didasari semangat persaingan bebas, paham liberalisme di tengah-tengah masyarakat yang bercorak industri kapitalis, menjadikan nasionalisme barat tumbuh menjadi suatu aliran yang penuh ambisi, sehingga melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk mencari tanah jajahan. Nasionalisme Timur atau Asia pada hakekatnya adalah cerminan kebangkitan bangsa Asia dalam menentang penetrasi Barat.

Beberapa ciri dari nasionalisme Barat dalam pandangan Soekarno (1999 : 72) adalah : (1) Nasionalisme Barat mengandung prinsip demokrasi yang berawal dari revolusi Perancis. Demokrasi yang dijalankan itu menurut Soekarno, hanyalah demokrasi politik, bukan dalam ekonomi. Kemenangan kaum borjuis pasca revolusi Perancis melahirkan demokrasi parlementer, yang biasa juga disebut demokrasi liberal. Demokrasi semacam ini kemudian melahirkan kapitalisme, (2) Perkembangan nasionalisme yang dijiwai oleh kapitalisme telah melahirkan imperialisme, suatu stelsel yang mencelakakan manusia. Munculnya imperialisme tersebut, menurut Soekarno, terutama disebabkan adanya kebutuhan akan bahan mentah, atau menurut Soekarno sendiri, adalah masalah rezki. Di samping itu karena adanya rasa kebangsaan yang agresif, (3) Lahirnya nasionalisme yang didasarkan atas kekuatan dan *self interest* memunculkan nasionalisme sempit atau rasa cinta tanah air yang mengejapkan mata, ekstrem dan berakibat lebih lanjut pada munculnya konflik, permusuhan dan pertikaian antara nasionalisme-nasionalisme, (4) Fasisme yang lahir di Barat, yang biasa disebut dengan nasionalisme Sosialisme sebagai salah satu bentuk jawaban terhadap perkembangan nasionalisme Barat yang dijiwai oleh kapitalisme dan demokrasi parlementer.

Nasionalisme Timur, memiliki prinsip-prinsip yang sangat berbeda dari nasionalisme Barat, bahkan berlawanan dengan nasionalisme Barat. Ciri-ciri nasionalisme Timur menurut Soekarno (1999 : 76) adalah: (1) Suatu nasionalisme

yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu, dan menjalankan rasa hidupnya itu sebagai suatu bakti; (2) Nasionalisme yang di dalam kelebarannya dan kekuasaannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa sebagai lebar dan luasnya udara, yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup; (3) Nasionalisme yang membuat kita menjadi “perkakas Tuhan” dan membuat kita hidup dalam roh, dengan nasionalisme yang demikian maka kita insyaf seinsyaf-insyafnya, bahwa negeri kita dan rakyat kita sebagian daripada negeri Asia dan rakyat Asia, dan sebagian daripada dunia dan penduduk dunia, dan (4) Nasionalisme yang sama dengan “rasa kemanusiaan”.

#### e. Tujuan Nasionalisme

Tumbuhnya nasionalisme Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda di Indonesia. Usaha untuk menolak kolonialisme yang merupakan manifestasi dari penderitaan dan tekanan inilah yang menyebabkan munculnya nasionalisme. Tujuan dari nasionalisme Indonesia ini antara lain adalah melenyapkan tiap-tiap bentuk kekuasaan penjajah dan mencapai Indonesia merdeka. Nasionalisme Indonesia secara umum bertujuan ke dalam, memperhebat *nation building* dan *character building* dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa, sedangkan tujuan ke luar secara antitesis dan antagonis melakukan konfrontasi atau menolak segala bentuk kolonialisme (Cahyo Budi Utomo, 1995 : 21-23).

Nasionalisme Asia dan Afrika mempunyai 3 aspek dan 3 tujuan, yakni: (1) Aspek politik bertujuan untuk mengusir imperialisme/penjajahan asing guna mendapatkan kemerdekaan; (2) Aspek sosial-ekonomi, yang berusaha untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan bertujuan untuk membangun masyarakat baru yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan, dan (3) Aspek budaya, yakni berusaha untuk menggali dan menghidupkan kembali budaya asli warisan nenek moyang yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. (Leo Agung, 2002 : 34).

#### f. Cara Mencapai Tujuan Nasionalisme

Cara mencapai tujuan nasionalisme antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain berbeda. Jika nasionalisme dipahami dalam kerangka ideologi, maka didalamnya terkandung aspek : (a) *Cognitive*, (2) *Goal/value orientation*, (c) *Strategic*. *Aspek cognitive* menunjukkan perlunya pengetahuan atau pengertian akan situasi konkret atau fenomena sosial, politik dan budaya bangsa. Dalam hal ini peran aktif kaum intelektual sangat menentukan, karena mereka adalah penyebar luas ide-ide ataupun berbagai konsep kehidupan sosial-politis kepada kaum sederhana pada umumnya entah lewat pendidikan atau media massa. *Aspek goal* menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan ataupun harapan ideal bersama di masa depan yang ingin diwujudkan atau diperjuangkan didalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, ideologi, budaya yang disepakati bersama. *Aspek strategic* menuntut adanya kiat perjuangan kaum nasionalis dalam perjuangan mereka dalam mewujudkan cita-cita bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kiat mana yang dipilih tergantung dengan situasi, kondisi dan waktu setempat yang dihadapi oleh suatu bangsa. (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 40).

Di Perancis dalam mencapai tujuan nasionalisme dengan cara mengadakan gerakan dan perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan mengadakan pembaharuan. Perkumpulan-perkumpulan itu antara lain yaitu : (1) Perkumpulan *Cordellier*, perkumpulan yang terdiri dari kaum cendekiawan Perancis yang menghendaki pembaharuan secara menyeluruh baik secara politik, sosial, dan ekonomi; (2) Perkumpulan *Jacobin*, kelompok ini dipimpin oleh orang-orang yang berhaluan radikal, keras dan ekstrem, yang menghimpun kaum buruh, petani kecil, penduduk pinggiran kota untuk melancarkan pembaharuan lewat cara-cara kekerasan seperti pemogokan dan pemberontakan; (3) Kelompok *Girondin*, pendirinya banyak berasal dari kalangan borjuis. Perkumpulan ini banyak mendapat dukungan dari kelas menengah Perancis yang menginginkan adanya pembaharuan dan menghapus sistem lama yang dinilainya tidak adil, dan (4)

Kaum bangsawan nasionalis yang menghendaki pembaharuan pemerintahan menjadi demokratis.

Dari beberapa kelompok tersebut cara-cara perjuangan yang ditempuh kaum nasionalis Perancis baik secara individual ataupun secara kelompok, dapat dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu (1) Kelompok dengan cara perjuangan yang bersifat radikal, artinya bila perlu memilih cara-cara kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya; (2) Kelompok nasionalis yang moderat, karena kaum nasionalis juga menghendaki pembaharuan atau perombakan terhadap rezim lama namun mereka menghindarkan diri dari cara-cara kekerasan atau teror (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 21).

Nasionalisme Italia muncul pertama-tama dari kalangan terpelajar, baik dari kaum bangsawan ataupun dari kalangan rakyat biasa. Cara yang ditempuh rakyat Italia untuk mencapai tujuan nasionalisme yaitu melalui gerakan-gerakan bawah tanah seperti Adelfi, Filadelfi, Guelfi. Gerakan bawah tanah ini bersifat politis dalam arti menuntut pembaharuan politik dengan nama Carbonari (Pembakar Arang). Kelompok-kelompok ini begitu militan dan sering melancarkan pemberontakan yang sifatnya dapat lokal maupun nasional. Melalui gerakan inilah rakyat Italia berusaha untuk mencapai tujuan nasionalisme yang diinginkan yaitu adanya pembaharuan bidang sosial, ekonomi dan politik (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 43).

Selain Perancis dan Italia negara yang ingin mencapai tujuan nasionalisme adalah Filipina. Di Filipina yang menimbulkan gerakan nasionalis yang pertama ialah mahasiswa-mahasiswa di Manila. Mereka mendirikan gerakan rahasia (1880) yang mereka sebut Companerisme (persahabatan). Tujuan gerakan ini adalah mengusahakan pendidikan yang patriotis. (Sutarjo Adisusilo, 2006 : 86).

## 2. Perjuangan

### a. Pengertian Perjuangan.

Maurice Duverger (2003: 157-159) menyebutkan berbagai definisi perjuangan adalah sebagai berikut :

1. Kaum konservatif tradisional menganggap perjuangan adalah usaha untuk merebut kekuasaan dan menempatkan elit (mereka yang mampu melaksanakan kekuasaan) melawan massa (mereka yang menolak untuk mengakui superioritas dari elite dan haknya untuk memerintah).
2. Kaum liberal melihat perjuangan (politik) sama seperti perjuangan ekonomi yaitu suatu bentuk dari struggle of life yang secara mendasar menempatkan suatu spesies melawan yang lain dan individu di dalam spesies tertentu melawan yang lain.
3. Kaum Marxis melihat perjuangan (politik) disebabkan oleh perjuangan kelas. Perjuangan kelas adalah pertentangan antara kelompok sosial yang terjadi dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan.

Sukarno (1984 : 39) mengartikan perjuangan dalam arti luas yaitu membangun moral material agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya dikemukakan tentang perjuangan individu yaitu perjuangan mempergunakan atau mengalahkan keadaan agar dapat tumbuh dan berkembang. Dari pengertian ini perjuangan memiliki luas aspek luas yang oleh Sukarno diartikan membangun. Sarana perjuangan adalah keadaan, baik untuk dipergunakan maupun dikalahkan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Darji Darmodiharjo (1983 : 12) perjuangan adalah substansi dari suatu kegiatan yang mengandung unsur-unsur. Adapun unsur-unsur secara umum yang ditampilkan dalam perjuangan adalah keberanian, kepahlawanan, kebenaran dan keikhlasan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perjuangan adalah usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang telah di cita-citakan.

## **b. Macam-Macam Perjuangan.**

Max Weber (1985 : 67) mengategorikan perjuangan dalam dua wujud atau bentuk, yaitu perjuangan fisik dan non fisik. Perjuangan fisik adalah sesuatu bentuk usaha ikhtiar, perlawanan untuk mencapai sesuatu tujuan dengan menggunakan benda, baik berupa senjata maupun benda-benda lain yang digunakan. Perjuangan fisik ini mencakup kekerasan fisik aktual dengan benda sebagai sarana. Sedangkan perjuangan non fisik adalah suatu usaha ikhtiar dan perlawanan dalam mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menggunakan benda sebagai sarana. Perjuangan non fisik lepas dari kekerasan aktual dan lebih mengarah pada usaha yang bersifat damai.

Menurut Sukarna (1981 : 28) perjuangan fisik lebih mengarah pada konfrontasi fisik dalam pencapaian tujuan, sebagai contohnya yaitu pertempuran, peperangan, penggulingan kekuasaan dengan kudeta, dan bentrokan senjata. Akibat yang ditimbulkan bersifat negatif, seperti kematian, cacat seumur hidup, kerusakan harta benda, kehilangan keluarga dan bahkan punahnya suatu populasi di suatu wilayah. Perjuangan non fisik merupakan perjuangan yang lebih mengarah pada perjuangan politik diplomasi, yaitu dilakukan dengan perundingan-perundingan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Perjuangan ini merupakan usaha-usaha politik yang dapat menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan, dalam arti mencegah kerugian-kerugian yang diderita jika dibanding dengan perjuangan dengan menggunakan kekerasan atau konfrontasi fisik. Di samping itu perjuangan non fisik juga dapat mengarah pada usaha-usaha individu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan tersebut dapat berupa karir dalam politik, usaha di bidang ekonomi, perjuangan jenjang pendidikan dan juga usaha dalam meningkatkan status sosial.

Maurice Duverger (2003 : 287-293) mengategorikan perjuangan politik ke dalam dua bentuk yaitu perjuangan terbuka dan perjuangan diam-diam. Dalam perjuangan terbuka konflik dapat jelas terlihat. Sedangkan dalam perjuangan diam-diam harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan ditutup-tutupi. Perjuangan terbuka biasanya muncul dalam negara-negara demokratis. Perjuangan terbuka dapat dengan mudah dilihat oleh semua orang, namun keterbukaan

perjuangan ini tidak absolut. Ada bagian-bagian tertentu yang ditutup-tutupi. Sedangkan perjuangan secara diam-diam sering muncul dalam negara otokrasi. Perjuangan politik dilakukan di bawah tameng atau sembunyi-sembunyi. Perjuangan ini sulit dilihat oleh masyarakat awam karena gerak perjuangan biasanya dilakukan dengan menggunakan kamufase yang mana tujuan-tujuan politik disembunyikan di balik tujuan-tujuan non politik.

Perjuangan Kashmir lebih mendekati pada bentuk perjuangan terbuka. Gerak perjuangan etnik Kashmir dapat dilihat oleh semua orang bahkan masyarakat dunia internasional. Perjuangan etnik Kashmir ini bersifat pada perjuangan nasional yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan India dan Pakistan setelah berakhirnya penjajahan Inggris pada tahun 1947.

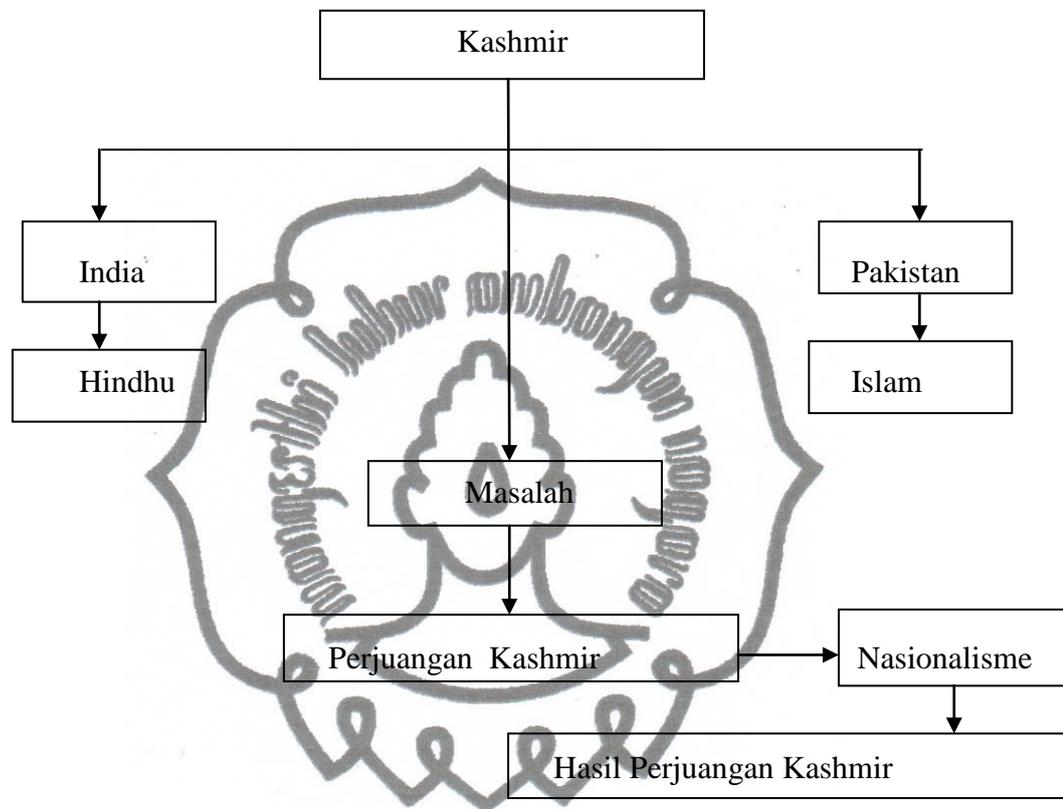
### **c. Faktor Penunjang Keberhasilan Suatu Perjuangan.**

Sukarna (1984 : 47) berpendapat bahwa besar kecilnya keberhasilan dan kemauan untuk berjuang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah sebagai berikut : (1) Menarik tidaknya atau cita-cita yang ingin dicapainya; (2) Adanya rasa optimisme bahwa mereka mampu untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya, (3) Adanya power yang ada di dalam diri individu maupun dalam suatu kelompok massa.

Dari pendapat Sukarna diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu perjuangan, dipengaruhi oleh faktor intern dan faktor ekstern, baik secara individu maupun kelompok. Faktor Intern tersebut faktor yang berasal dari dalam diri individu sehingga motivasi diri untuk melakukan perjuangan. Faktor dari dalam diri antara lain motivasi pribadi, adanya kemauan, adanya rasa optimis akan tercapainya tujuan dan rasa mampu untuk melakukannya. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu maupun kelompok yang mendukung perjuangan. Faktor-faktor tersebut dapat berwujud materi dan non materi. Materi dalam contohnya adalah keuangan, sarana dan prasarana perjuangan. Non materi dapat berwujud dukungan sehingga dapat memperoleh dukungan.

## B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran yang di dasarkan pada tema dan masalah penelitian, maka dapat di gambar sebagai berikut:



Keterangan :

Permasalahan di Kashmir bermula pada tahun 1947, ketika India terpecah menjadi dua negara yaitu India dan Pakistan. Benih permusuhan dua negara ini berawal dari sejarah pemisahan pasca hengkangnya Inggris tahun 1947. Mulai saat itu Kashmir menjadi wilayah yang diperebutkan antara India dan Pakistan, di mana mayoritas penduduk India beragama Hindhu dan penduduk Pakistan beragama Islam. Pertikaian dua negara tersebut yang memperebutkan Kashmir menimbulkan masalah Kashmir yang berlarut-larut dan tidak menemukan penyelesaian yang tepat, yang akhirnya menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir dan menghendaki menjadi negara merdeka yang seutuhnya.

*commit to user*

Masalah Kashmir semakin memanas saat rakyat Kashmir menginginkan negara yang merdeka tanpa adanya campur tangan India dan Pakistan. Munculnya perjuangan etnik Kashmir mendorong tumbuhnya rasa nasionalisme rakyat Kashmir sebagai tanda rasa cinta tanah air dan bangsanya. Rasa kebangsaan Kashmir tumbuh karena pengalaman panjang yang menyakitkan sebagai bangsa terjajah. Selain itu keyakinan rakyat Kashmir yang diwariskan secara turun temurun bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok-kelompok etnik lain di India.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990” yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Adapun perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian meliputi perpustakaan :

- a. Program Pendidikan Sejarah Jurusan P.IPS FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Fakultas Sastra Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- d. Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- e. Ignatius College Yogyakarta.
- f. Buku-buku koleksi pribadi.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejak proposal disetujui pembimbing yaitu bulan Januari 2010 sampai dengan Juli 2010. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tersebut adalah mengumpulkan sumber, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan sumber, menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian.

#### **B. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Methodos*” yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan tulisan ilmiah, yang dimaksud metode yaitu cara kerja sistematis yang mengacu pada aturan baku yang sesuai dengan permasalahan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

(Koentjaraningrat, 1977 : 12). Metode hubungannya dengan suatu prosedur, proses atau teknik yang sistematis dalam menyelidiki suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek atau bahan-bahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode sejarah.

Sartono Kartodirjo (1992 : 37) berpendapat bahwa metode penelitian sejarah adalah prosedur dari cara kerja para sejarawan untuk menghasilkan kisah masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh masa lampau tersebut. Metode sejarah bertujuan untuk memastikan dan menyatakan kembali fakta-fakta masa lampau, dan penulisan sejarah merupakan cara untuk merekonstruksi gambaran masa lampau berdasarkan bukti-bukti dan data yang diperoleh dari peninggalan masa lampau.

Menurut Kuntowijoyo (1994 : 24), metode sejarah didefinisikan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi dan penyajian sejarah. Menurut Gilbert J. Gharagan yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999 : 43), metode sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis yang digunakan secara efektif untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.

Dinyatakan oleh Louis Gottschalk (1983 : 32) metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi cerita sejarah yang dapat dipercaya.

Dalam penelitian sejarah, terdapat empat kegiatan pokok, Louis Gottschalk (1983: 13) mensistematisasikan langkah-langkah itu sebagai berikut:

- (1) Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan;
- (2) Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak otentik;
- (3) Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik, dan
- (4) Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu cerita atau penyajian yang berarti.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode sejarah adalah kegiatan pengumpulan sumber-sumber sejarah, menguji dan menelitinya

secara kritis mengenai jejak masa lampau kemudian merangkai suatu cerita sejarah yang dapat dipercaya.

### C. Sumber Data

Sumber sejarah sering juga disebut “data sejarah”. Perkataan “data” merupakan bentuk jamak dari kata tunggal “*datum*” dalam bahasa latin, yang berarti “pemberitaan” (Kuntowijoyo, 1995 : 96). Data sejarah itu sendiri berarti bahan sejarah yang memerlukan pengolahan, penyeleksian dan pengkategorian.

Menurut Helius Sjamsuddin (1996 : 73) dalam penelitian sejarah, yang menjadi sumber data adalah sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan bahan mentah (*raw material*) sejarah yang mencakup segala evidensi atau bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas manusia di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan/lisan.

Menurut Sidi Gazalba (1981 : 105) sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu: (1) Sumber lisan merupakan sumber tradisional sejarah dalam pengertian luas; (2) Sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak dalam penelitian sejarah; (3) Sumber visual atau benda, berupa warisan prasasti, candi dan artefak.

Menurut Louis Gottschalk (1983: 35) sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dari panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sedangkan sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir dalam peristiwa yang diceritakannya.

Demikian halnya pendapat Moh. Nazir (1988 : 58 - 59) sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpanan yang orisinil dari data sejarah. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lampau. Contoh sumber primer antara lain : catatan resmi yang dibuat pada suatu acara , suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, autobiografi, dan surat kabar yang tebit pada masa

peristiwa itu terjadi atau sejaman. Sedangkan sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder, yang ada kaitannya dengan nasionalisme etnik Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990. Sumber primer berupa surat kabar yaitu *Deseret News* 2 September tahun 1965 "*Pakistanis Push Kashmir Battle*", *Deseret News* Wednesday 22 September tahun 1965 "*Kashmir Cease-Fire*", *Tempo* 5 Mei 1990 "*Nyala Jihad Di Azab Kashmir*", *Tempo* 22 Februari 1992 "*Duri Dalam Daging*", *Tempo* 11 April 1992 "*Dua Musuh Kashmir*". Sumber sekunder berupa buku antara lain: (1) *Nasionalisme Etnik Kashmir dan Quebec*, tulisan Edwin M.B Tambunan, (2) *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, tulisan Robert L. Hardgrave Jr, (3) *India : Sedjarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*, tulisan Dr TSG Mulia, (4) *Muslim di India*, tulisan Dhurorudin Mashad.

Kecanggihan informasi yang berkembang dewasa ini memberi kemudahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan secara cepat melalui internet. Oleh karena itu, selain menggunakan data dari majalah, surat kabar dan buku, juga digunakan beberapa artikel yang diperoleh dari internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang digunakan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan membaca buku-buku literatur, majalah, surat kabar dan bentuk pustaka lainnya (Koenjaraningrat 1987 : 75).

Studi pustaka perlu dilakukan untuk menggali data yang ada, agar memperoleh kajian yang luas dari permasalahan yang dipilih serta menghindari duplikasi yang tidak diinginkan. Pendapat Kartini Kartono (1983 : 67) bahwa studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan

misalnya: buku, tabloid dan surat kabar. Data yang telah terkumpul berfungsi sebagai wahana informasi terhadap materi yang akan dibahas dalam penelitian.

Menurut Koentjaraningrat (1986 : 36), keuntungan dari studi pustaka ini ada empat hal, yaitu : (1) memperdalam kerangka teoritis yang digunakan sebagai landasan pemikiran; (2) memperdalam pengetahuan akan masalah yang diteliti; (3) mempertajam konsep yang digunakan sehingga mempermudah dalam perumusan, dan (4) menghindari terjadinya pengulangan suatu penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkunjung ke perpustakaan untuk mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan juga membaca buku koleksi pribadi.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Moh. Nazir, 1988 : 405).

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis historis yaitu teknik analisis yang mengutamakan ketajaman dalam melakukan interpretasi. Sartono Kartodirdjo (1992 : 118 - 19) berpendapat bahwa langkah terpenting membuat analisis sejarah adalah penyediaan suatu kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep atau teori yang akan dipakai dalam membuat fakta sejarah.

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sejarah itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Berkhofer yang dikutip Ibrahim Alfian (1986 : 172), bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan bersama-sama dengan teori yang relevan, kemudian data itu disusun menjadi kisah yang dipercaya kebenarannya.

Analisis data dapat dilakukan dengan aturan-aturan : fakta sejarah harus di seleksi, disusun, diberi, atau dikurangi tekanannya (tempat atau bahasanya) dan ditempatkan dalam aturan kausal. Dari keempat aturan menyusun fakta tersebut, seleksi merupakan masalah penting sehingga peneliti harus mampu memilih dan

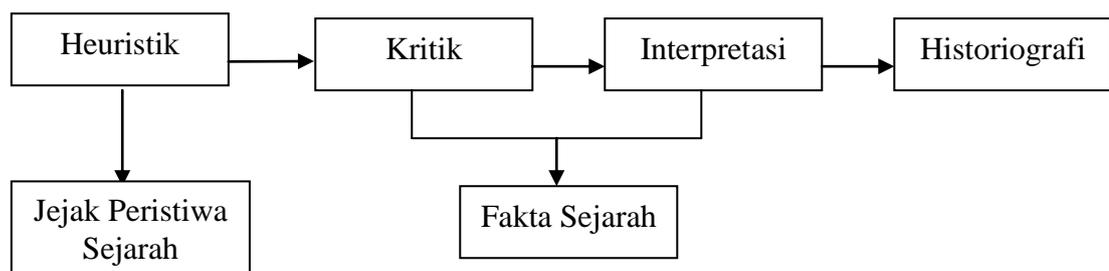
memilah fakta mana yang lebih relevan dari sejumlah data (Dudung Abdurahman, 1999 : 25).

Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengumpulan terhadap berbagai materi/data yang sesuai dengan tema penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian dilaksanakan kritik sumber dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan data yang obyektif mungkin. Data yang telah diseleksi tersebut kemudian ditafsirkan sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta merupakan bahan utama bagi sejarawan untuk menyusun historiografi, sedangkan fakta sejarah selalu mengandung unsur subyektifitas sehingga dalam menganalisa data diperlukan konsep dan teori sebagai ceritera penyeleksian, pengidentifikasian dan pengklasifikasian. ( Sartono Kartodirjo, 1992 : 92).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengklasifikasikan sumber data yang telah terkumpul yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Langkah selanjutnya adalah kritik sumber baik kritik intern maupun kritik ekstern. Data dari sumber yang satu dibandingkan dengan data dari sumber yang lain guna memperoleh kredibilitas data. Mengacu pada kajian teori, fakta diberi keterangan baik yang mendukung atau menolak sampai tersusun fakta yang saling menunjukkan hubungan yang relevan guna mendapatkan hasil penelitian yang utuh untuk sebuah karya ilmiah.

## F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *historis* maka dapat digambarkan skema sebagai berikut:



**Keterangan:****1. Heuristik**

Heuristik berasal dari bahasa Yunani "*Heurishein*" yang artinya memperoleh. G.J Renier yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 55) menyatakan *heuristic* merupakan suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, *heuristic* tidak mempunyai peraturan umum. Heuristik adalah teknik untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Menurut Sidi Gazalba (1981 : 15) *heuristic* adalah kegiatan mencari bahan atau menyelidiki sumber sejarah untuk mendapatkan bahan penelitian. G.J Renier yang dikutip Helius Syamsudin (1994 : 15) menyatakan *heuristic* adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah, pada tahap ini akan ditemukan sumber data yang sesuai dengan tema penelitian, sehingga teknik yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Dalam pengumpulan sumber, dibaca buku dan surat kabar yang ada di perpustakaan serta buku koleksi pribadi.

**2. Kritik**

Kritik adalah menyelidiki dan memberi penilaian terhadap data yang diperoleh apakah data itu sejati atau bukan, agar didapatkan fakta. Kegiatan ini dilakukan untuk membuang data yang tidak otentik. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993: 16) kritik meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern berhubungan dengan kredibilitas dari sumber sejarah, yaitu apakah cerita, isi dan faktanya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi sumber satu dengan isi sumber yang lain (surat kabar dan buku), apakah sumber-sumber tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan apakah sumber tersebut sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Kritik ekstern berkaitan dengan sumber data, apakah sumber data yang dipakai dalam penelitian otentik atau tidak. Dalam penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, tahun pembuatan dan ejaan pada sumber tersebut.

### **3. Interpretasi**

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis berarti menguraikan, secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi (Kuntowijoyo, 2001 : 100)

Dalam penelitian ini, interpretasi data dilakukan dengan menafsirkan, memberi makna dari data yang diperoleh serta menghubungkan data yang satu dengan data yang lain dikaitkan dengan teori maupun konsep yang mendukungnya sehingga muncul fakta sejarah. Penafsiran sangat penting dilakukan agar data menjadi fakta sejarah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.

### **4. Historiografi**

Historiografi merupakan langkah terakhir di dalam prosedur penelitian sejarah. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memaparkan hasil penelitian secara tertulis dengan bahasa ilmiah, menjelaskan mengenai apa yang telah diteliti beserta argumentasinya secara sistematis. Historiografi merupakan langkah merangkai fakta sejarah menjadi cerita sejarah. Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990”.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Permasalahan Yang Terjadi Di Kashmir Dengan Adanya Pertikaian India Dan Pakistan

#### 1. Letak Geografis Kashmir

Kashmir adalah sebuah wilayah di utara sub-benua India. Istilah Kashmir secara sejarah digambarkan sebagai sebuah lembah di Selatan dari ujung paling Barat barisan Himalaya. Secara politik, istilah Kashmir dijelaskan sebagai wilayah yang lebih besar, termasuk wilayah Jammu, Kashmir, dan Ladakh. "*Vale of Kashmir*" relatif rendah dan sangat subur, dikelilingi oleh gunung dan dialiri oleh banyak aliran dari lembah-lembah. Tempat ini dikenal sebagai suatu tempat paling indah spektakuler di dunia. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kashmir>, diunduh pada minggu 16 Mei 2010).

Sungai-sungai yang mengalir di negara itu antara lain sungai Indus, Jhellum, Khenab, Zakar dan Syok. Banyaknya aliran sungai dan irigasi yang bagus membuat tanahnya sangat subur dan potensial untuk pertanian, sedangkan keadaan alamnya yang bergunung-gunung membuat Kashmir sangat potensial untuk wisata. Bahasa yang digunakan di Kashmir adalah bahasa Urdu (Bahasa resmi secara tehnik) di beberapa daerah, sedikit yang berbahasa Inggris. Ibukota Kashmir adalah Islamabad (Srinagar). Srinagar adalah nama dahulu atau ibukota kuno Kashmir yang terletak di dekat Danau Dal, sebuah danau yang terkenal karena kanal dan rumah perahunya. (<http://www.arrassmah.Com/index.php/blog/read/1655/kashmir-bumi-jihad-yang-terlupakan>, diunduh pada Jumat 7 Mei 2010).

Di bidang militer, lembah Kashmir adalah tempat yang sangat strategis bagi pertahanan negara dengan wilayahnya yang memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah dengan perbatasan dengan banyak negara seperti Afganistan, China, Tibet. (Konflik Kashmir, <http://badielyk.blogspot.Com/2010/03/latar-belakang-konflik-kashmir.html>, diunduh pada Minggu 14 Juni 2010).

*commit to user*

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Pakistan di sebelah Barat, Afganistan dibagian Utara, dan Republik Rakyat Cina (RRC) di sebelah Timur. Sebelum tahun 1947, semasa pemerintahan Maharaja Hari Singh, wilayah ini memiliki luas sebesar 222.236 km<sup>2</sup> (85,809 mil) yang dibagi atas empat propinsi, yaitu: Azad Kashmir (North-ern Areas), *Kashmir Valley* (sering disebut Kashmir saja), Jammu, dan Ladakh. Setelah berakhirnya kekuasaan Hari Singh pada tahun 1947, wilayah ini terpecah menjadi tiga bagian. Azad Kashmir memproklamasikan diri menjadi bagian dari Pakistan. Daerah Aksai Chin, yang merupakan bagian dari Ladakh, diduduki RRC (Republik Rakyat Cina) dan sisanya (Kashmir, Jammu, dan Ladakh) menjadi bagian dari India. Ketiga daerah ini oleh India kemudian digabung menjadi satu negara bagian dengan sebutan Jammu dan Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 15).

Kashmir terdiri atas lima daerah: Lembah Kashmir, Jammu, Ladakh dan Baltistan, Poonch, serta Gilgit. Penduduknya terdiri atas lima etnis Arya, Mongol, Turki, dan Afghan. Berdasarkan sensus tahun 1941 jumlahnya 4.021.616 dimana yang menganut agama Islam sebanyak 77%, Hindu 20%, serta 3 % merupakan penganut Sikh. Sedangkan berdasarkan sensus pemerintah India pada 1981, penduduk Kashmir yang ada dalam wilayah ini berjumlah 5.987.389 jiwa, dimana 64,2 % di antaranya adalah pemeluk Islam, 32,25 % Hindu, 2,23 % Sikh, dan sisanya merupakan pemeluk agama Budha, Kristen serta Jain. Adapun wilayah Kashmir Pakistan berdasarkan sensus tahun yang sama oleh pemerintah Islamabad, berjumlah 1.983.465 jiwa dan 99,8% di antaranya merupakan muslim, sisanya merupakan penganut Ahmadiyah, Kristen, dan Hindu. (Dhurorudin Mashad, 2006 : 83-84).

## **2. Sejarah Kashmir**

Kashmir mulai didiami oleh kasta Brahma pada saat agama Budha diperkenalkan oleh para misionaris Asoka pada tahun 274 sebelum masehi. Pada abad ke-7 daerah ini dipimpin oleh dinasti Karkota, kemudian diteruskan oleh dinasti Utpalas, Tantrins, Yaskaras dan Parva Gupta. Pada tahun 1001 tentara Muslim menyerang Kashmir tetapi tidak pernah dapat menguasainya. Ratu Didda

dari dinasti Gupta memerintah Kashmir di tahun 1003 ketika dinasti Lohara mengambil alih pemerintahan. Raja Hindu yang terakhir, Udiana Deva, diganti oleh Shams-ud-Din di tahun 1346, yang mana dinastinya memerintah hingga tahun 1586 ketika bangsa Mughul (turunan Persia-Mongol) Kaisar Akbar menaklukan Kashmir dan memperkuat pengaruh Muslim disana. Akbar adalah cucu dari Babur, yang telah mengembangkan dinasti Muslim paling berpengaruh di India (di tahun 1526). Akbar mentoleransi kehidupan antar agama dan menikahi seorang putri Hindu. Di tahun 1752 pemimpin Afghanistan yang bernama Ahmed Shah Durrani mengalahkan pasukan Mughal dan menguasai Kashmir. Perselisihan antara Muslim dan Hindu pecah, menciptakan situasi yang tidak kunjung reda dan bibit konflik di Kashmir. ([http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story\\_id.html](http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story_id.html), diunduh pada Sabtu 27 Maret 2010).

Letak Kashmir yang terpencil di utara India telah membuat wilayah ini dapat menikmati statusnya sebagai daerah otonomi yang cukup panjang hingga tahun 1586. Pada periode itu, Kashmir mengatur dirinya sendiri layaknya sebuah negara. Dalam masa tersebut berbagai agama masuk yaitu Hindu, Budha dan Islam. Agama tersebut hidup berdampingan secara damai. Gelombang kedatangan agama yang terakhir, yaitu Islam, membuat penduduk Kashmir mayoritas memeluk Islam. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 16).

Di tahun 1819 Sikh Ranjit Singh menguasai Kashmir, tetapi akibat kerapuhan pemerintahannya maka kekaisarannya hancur dan jatuh ketangan Inggris. Inggris mengambil-alih Punjab di tahun 1846. Kashmir kemudian dijual kepada Maharaja Ghulab Singh (yang menobatkan dirinya sendiri) dari Jammu seharga 7.5 juta Rupee (sekitar US\$ 166) dibawah Perjanjian Amritsar. Ghulab Singh juga menguasai Ladakh, Zanskar, Gilgit dan Baltistan dibawah kontrolnya. Dilanjutkan oleh para penerus Maharaja, yang ditandai dengan beberapa pemberontakan oleh rakyat Kashmir. Di tahun 1889 Maharaja Pratap Singh kehilangan kekuasaan administratif atas Kashmir akibat memburuknya kondisi pada daerah perbatasan. Inggris kemudian mengembalikan kekuasaan penuh kepada Dogra untuk memerintah di tahun 1921. ([http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story\\_id.html](http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story_id.html), diunduh pada Sabtu 27 Maret 2010).

Sementara itu di India, pergerakan kemerdekaan semakin mendapatkan kekuatan di bawah kepemimpinan Mohandas Karamchand Gandhi (Orang India menamakannya "Mahatma" yang berarti "Jiwa yang besar"). Seruan kemerdekaan segera menggema di daerah-daerah yang dikuasai para raja, terutama di Kashmir. Setelah terjadi pemberontakan massal terhadap Hari Singh di tahun 1931, Sheikh Mohammad Abdullah mendirikan partai politik pertama di Kashmir, Kongres Persatuan Muslim Jammu dan Kashmir di tahun 1932. Di tahun 1934 Maharaja mengizinkan dan memberikan demokrasi yang terbatas dalam bentuk sebuah Dewan Legislatif. Pimpinan Muslim tertinggi di lembah Kashmir, Mirwaiz Maulvi Yusuf Shah, bergabung dalam Kongres, tetapi setelah mendapatkan tunjangan bulanan dari Maharaja, Sheikh Abdullah beralih dari Kongres Muslim dan membentuk Kongres Nasional yang sekular di tahun 1939, terdiri dari golongan Hindhu, Muslim dan Sikh. ([http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story\\_id.html](http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story_id.html), diunduh pada Sabtu 27 Maret 2010).

Di tahun 1947, Mahatma Ghandi memimpin gerakan bangsa India untuk merdeka dari penjajahan Inggris dengan perjuangan yang gigih, tetapi perjuangan itu memang mahal sekali. Sampai kemerdekaan India tercapai, Mahatma Gandhi berjuang, berpuasa, mengajar rakyat, hidup berkorban dengan memberikan contoh yang baik. Perkataan dan perbuatan selalu selaras pada diri Mahatma Gandhi. Selain itu setelah India merdeka pada tanggal 15 Agustus 1947, Mahatma Gandhi berjuang untuk persatuan Hindhu-Muslim. (O.D.P Sihomping, 1961 : 99).

Pada saat Gandhi memimpin pergerakan umat Hindu, Mohammad Ali Jinnah sedang berjuang bersama umat Muslim. Jinnah menuntut pemisahan India menjadi dua bagian: Muslim dan Hindu. Ketika Inggris angkat kaki dari India, Liga Muslim mendirikan negara Pakistan (berasal dari Propinsi Pakistan Barat) dan Bangladesh. Kerusuhan merebak ketika minoritas Muslim dan Hindu merasa terjebak di beberapa daerah, dan dalam waktu 1 minggu 1/2 juta penduduk tewas. Gandhi yang renta bersumpah untuk berpuasa hingga kerusuhan berhenti, dan hal itu dilakukannya hingga membahayakan kesehatannya sendiri. Pada saat yang sama, Inggris kembali untuk membantu mengembalikan keadaan. Keadaan kembali aman, kecuali daerah Kashmir. Selama masa pembagian India di tahun

1947, Jammu dan Kashmir adalah salah satu dari 560 *Princely States*, yang bukan merupakan daerah teritori di bawah hukum negara Inggris tetapi berada di bawah wewenang langsung Kerajaan Inggris. Hukum yang berlaku saat itu memberikan kebebasan Kashmir untuk bergabung dengan India atau Pakistan, atau tetap berdiri sendiri. Pada tanggal 19 Juli 1947 Kongres Muslim memberikan keputusan resmi melawan India, yaitu tetap berdiri sendiri, tetapi suara mereka tidak mewakili suara seluruh rakyat, terutama tidak adanya dukungan dari pihak Hindu. Maharaja kemudian menyetujui untuk menggabungkan Kashmir ke dalam India berdasarkan sebuah Perjanjian Asemi pada tanggal 26 Oktober 1947. Perjanjian Asemi inilah yang akhirnya menjadikan perselisihan antara India dan Pakistan yang mempersoalkan Kashmir. ([http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story\\_id.html](http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story_id.html), diunduh pada Sabtu 27 Maret 2010).

### **3. Pentingnya Kashmir bagi India dan Pakistan**

Setelah mengetahui keadaan dan sejarah negara Kashmir, maka dapat dilihat betapa pentingnya wilayah tersebut bagi India dan Pakistan. Untuk meningkatkan kekuatan nasional, faktor geografis merupakan faktor yang sangat penting disamping beberapa faktor lain seperti sumber daya alam, kemampuan industri, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah. (Hans J Morgenthau, 1990 : 170).

Sebelum pembagian India-Pakistan pada tahun 1947, Kashmir merupakan kerajaan terbesar di subkontinen, selain itu Kashmir sangat potensial bagi pertanian dan pariwisata. Mengingat kondisi geografisnya yang sangat subur dan indah, wilayah ini juga sangat strategis bagi India dan Pakistan. Selain posisinya yang strategis Kashmir menyimpan banyak potensi baik sumber alam, keindahan alam, ikatan historis, ikatan agama maupun ikatan budaya. Kashmir juga merupakan negara asal ajaran agama Hindu serta banyak tokoh nasional dilahirkan disana. Semua ini dapat menjadi faktor kekuatan nasional India maupun Pakistan. Oleh karena itu negara ini menjadi rebutan antara negara tersebut.

Alasan India mempertahankan Kashmir jelas, karena Kashmir mempunyai sumber daya alam yang sangat vital bagi negeri Mahabhara, yaitu air. Ada tiga

sungai yang sangat vital di wilayah Kashmir, yaitu sungai Indus, Chenab dan Jhelum. India jelas tidak mau melepaskan wilayah Kashmir karena dengan cara itu berarti melepas tiga muara sungai itu. Hal ini jelas sangat merugikan India, karena sungai-sungai itu merupakan sumber air yang penting bagi India. (Dhurorudin Mashad, 1999 : 105-106).

Bagi India, Kashmir merupakan sumber peradaban Hindhu serta tempat dilahirkannya beberapa tokoh India. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa Kashmir adalah “kepala” sedangkan seluruh wilayah India adalah “anggota badan”. Jika Kashmir terpisah dari India berarti sama saja dengan memenggal kepala India. Oleh karena itu dengan pengorbanan dan berbagai cara, Kashmir harus dipertahankan dari India.

Pakistan mengklaim hubungan historisnya dengan Kashmir karena sejak abad 14 Kashmir telah dikuasai raja Islam. Ikatan sejarah Islam yang sama ini mengetuk hati Pakistan untuk mempertahankan Kashmir. Hal ini juga sebagai manifestasi ajaran Islam bahwa sesama muslim adalah saudara. Sudah menjadi tanggungjawab moral Pakistan untuk membela saudara sesama.

#### **4. Masalah Kashmir**

Sewaktu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, status pemerintahan wilayah-wilayah di Asia Selatan dibagi oleh Inggris atas dua kategori, yang pertama adalah wilayah yang berada dibawah kekuasaan mahkota Inggris. Seluruh wilayah dalam kategori ini disebut British India. Kategori kedua adalah wilayah-wilayah yang disebut dengan *princely state*. Wilayah semacam ini pada dasarnya independen, bebas menyelenggarakan urusannya sendiri (kecuali dalam hal pertahanan, politik luar negeri, dan komunikasi), selama mengakui Inggris sebagai kekuasaan tertinggi (*paramount power*) di subkontinen.

Pada bulan Februari 1947 keluar pengumuman dari Inggris yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris akan mengundurkan diri dari India paling lambat bulan juni 1948. Menjelang kemerdekaan India, pemerintah Inggris memerintahkan Mounbatten untuk menjabat sebagai raja muda inggris di India karena dinilai sebagai orang yang *commit to user* dalam tindakannya. Setelah melalui

perundingan yang cukup tegang antara Mountbatten dengan tokoh-tokoh seperti Jawaharlal Nehru, Gandhi, dan Ali Jinnah akhirnya dicapai untuk mendirikan dua negara yang terpisah yaitu India dan Pakistan. (Tuti Nuriah, 1990 : 70-71).

Pada 1947, Inggris bukan saja memberi kemerdekaan kepada India dan Pakistan, tetapi juga meninggalkan “warisan berdarah” yaitu Kashmir. Pakistan menganggap, seharusnya Kashmir sejak Agustus 1947 menjadi bagian dari wilayahnya karena mayoritas penduduknya muslim. Sebaliknya menurut pihak India, sebelum tahun itu Kashmir sudah menjadi bagian dari wilayah India lewat perjanjian Amritsar 16 Maret 1946. (Dhurorudin Mashad, 2006 : 84).

Menjelang kemerdekaan dan partisi, Lord Mountbatten wakil tertinggi pemerintahan Inggris yang terakhir di India, mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya kekuasaan Inggris, penguasa *princely state* diharuskan memilih satu dari dua alternatif, yaitu bergabung dengan India atau Pakistan. Dalam dekrit alternatif kemerdekaan sama sekali tidak disebutkan. Berdasarkan isi dekrit, keputusan aksesori harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kedekatan geografis, kesamaan budaya, kesamaan struktur, dan tingkat kemajuan ekonomi, dan demografi wilayah masing-masing. Kashmir menghadapi dilema sehubungan dengan alternatif yang diberikan Mountbatten. Kashmir yang wilayahnya terletak antara India dan Pakistan memiliki monarki Hindu yang kala itu dipegang Maharaja Hari Singh. Oleh karena itu, Hari Singh lebih dekat dengan India. Sementara itu penduduk Kashmir mayoritas beragama Islam sehingga berdasarkan isi dekrit Mountbatten, Kashmir sepatutnya berintegrasi dengan Pakistan. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 18).

Sejak awal rakyat Kashmir berkehendak masuk ke dalam Pakistan, karena secara historis, emosional, dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan yang sama agama, tetapi penguasanya yang Hindu, Maha Raja Hari Singh bersikap ragu-ragu sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir. Pada Agustus-September 1947 muncul gelombang protes rakyat Kashmir yang dibantu Pakistan. Hari Singh merasa ketakutan sehingga meminta bantuan New Delhi. PM Jawarlal

Nehru bersedia membantu dengan syarat ada jaminan wilayah Kashmir bergabung ke India. (Dhurorudin Mashad, 1999: 105).

India menegaskan bahwa semua negara bekas kepangeranan Jammu dan Kashmir secara hukum merupakan bagian dari India dan Pakistan adalah wilayah India yang menempati secara ilegal. Pakistan menegaskan bahwa masa depan wilayah Kashmir harus ditentukan oleh suatu plebisit, sesuai dengan janji India pada akhir 1947, tetapi India malah menarik janjinya untuk mengadakan plebisit di Kashmir, diduga atas dasar bahwa Pakistan belum menerima prasyarat yang diperlukan untuk plebisit atau ditarik pasukannya dari "Azad Kashmir". India membenarkan posisinya di Kashmir berdasarkan Perjanjian Maharaja Kashmir dan India pada akhir bulan Oktober 1947. (George Mc Turnan Kahin, 1974 : 396).

Kedudukan India pada masalah Kashmir, dinyatakan oleh Presiden Rajendra Prasad dalam pidatonya kepada Parlemen pada tanggal 19 Maret 1957, bahwa : "Jammu and Kashmir State is and has been a constituent State of the Union of India since October 1947, like other States which acceded to the Union". (George McTurnan Kahin, 1974 : 396).

Menurut *Indian Independence Act* kerajaan-kerajaan swapraja diizinkan memilih atas kemauan sendiri dengan negara manakah mereka bergabung. Soal ini dihadapi oleh Kashmir dan Jammu di sebelah utara India. Kerajaan ini sejak berabad-abad didiami oleh tiga golongan rakyat yaitu Muslimin, Hindu, dan Sikh, tetapi yang terbanyak adalah kaum Muslimin. Sebelum Raja Jammu dan Kashmir menentukan dengan negara mana akan menggabungkan diri setelah penyerahan kedaulatan kepada India dan Pakistan, pada bulan oktober 1947 negerinya diserang oleh bangsa Afridi yang berdiam di daerah batas Kashmir dan beragama Islam. Mereka menyerang secara teratur dengan menggunakan senjata lengkap. Dalam keadaan yang genting itu Raja Jammu dan Kashmir menyatakan dengan resmi bahwa ia akan menggabungkan kerajaannya dengan negara India. Dengan terus terang ia meminta bantuan militer untuk melindungi kerajaannya terhadap serangan gerombolan-gerombolan Afridi. India mengirim pasukan ke Kashmir dengan maksud mempertahankan ketentraman di sana hingga rakyat negeri itu

dapat menyatakan kemauannya secara plebisit, negara manakah yang akan dipilih India atau Pakistan. (TSG Mulia, 1959 : 270).

Masuknya pasukan India menandai dua hal dalam perkembangan masalah Kashmir. Pertama, bagi penduduk Muslim Kashmir masuknya pasukan India ditafsirkan sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip partisi dan juga pengkhianatan terhadap visi kemerdekaan yang dilontarkan Hari Singh sendiri. Kedua, kehadiran pasukan India berarti berlanjutnya dominasi asing (Hindhu dan Sikh) atas penduduk Muslim Kashmir. Kenyataan ini, bagi kelompok-kelompok pejuang Kashmir hal itu memperkuat keinginan mereka untuk lepas dari India dan bergabung dengan Pakistan atau merdeka. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 15).

Pada 1 Januari 1948 India mengajukan dakwaan pada Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pakistan dituduh membantu bangsa Afridi untuk menyerang Kashmir dan Jammu dengan terang-terangan karena negeri tersebut keduanya telah bergabung dengan India. India menuntut supaya Pakistan menghentikan bantuannya, menarik kembali pasukan-pasukannya serta pegawai-pegawainya yang telah ditempatkan di sana untuk mengatur pemerintahan dan melarang kaum Afridi mempergunakan tempat-tempat dalam daerah Pakistan sebagai benteng-benteng dan markas-markas penyerangan negeri Kashmir. Dakwaan ini ditolak oleh Pakistan dengan sekeras-kerasnya dan menuduh India sebaliknya melanggar perjanjian perbatasan yang sudah diadakan antara dua negara itu. Lagi pula penggabungan Kashmir dan Jammu dengan India tidak diakui Pakistan dengan sah. Pakistan meminta supaya Dewan Keamanan membentuk suatu komisi untuk menyelidiki keadaan yang sebenarnya. (TSG Mulia, 1959 : 270-271).

Saat beberapa pekan mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan merundingkan soal Kashmir, maka Dewan Keamanan membentuk suatu Komisi pemeriksa dan perantara terdiri dari 3 anggota, satu yang ditunjuk oleh India, satu oleh Pakistan dan anggota-anggota yang ditunjuk keduanya akan memilih anggota yang ketiga. Akan tetapi kenyataannya komisi itu tidak dapat bekerja karena keberatan dari kedua belah pihak, sedang perkelahian dan serang-serangan di

Kashmir terus berlaku. Pada bulan April 1948 Dewan keamanan mendesak dalam resolusi supaya India dan Pakistan menghentikan permusuhan (*cease fire*) dan merundingkan dengan syarat-syarat bagaimanakah dapat disiapkan plebisit yang akan menentukan keinginan rakyat dalam negeri itu. Untuk melancarkan pekerjaan Komisi itu Dewan Keamanan menasehatkan supaya gerombolan-gerombolan dari luar yang menyerbu ke dalam daerah Kashmir-Jammu dipaksa meninggalkan negeri itu, begitu juga pasukan-pasukan India dan orang-orang yang pindah ke sana setelah permusuhan terjadi. Akan tetapi penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah dan miliknya karena serangan-serangan harus diizinkan kembali ketempatnya yang dulu. Plebisit akan diatur oleh suatu badan pelaksana yang menerima kuasa dari pemerintahan negeri Kashmir dan Jammu.

Komisi ditambah dengan dua anggota baru dan diperintahkan berangkat ke India dengan segera untuk menjalankan tugasnya. Pada bulan Mei berikutnya India dan Pakistan memberitahukan dengan resmi kepada Dewan Keamanan bahwa mereka keberatan memenuhi permintaan dalam resolusi itu. India tidak setuju dengan penarikan pasukan-pasukannya sebelum plebisit selesai dan keberatan jika pasukan-pasukan Pakistan dipergunakan dalam mengeluarkan gerombolan-gerombolan yang menyerbu, sebab kenyataannya bahwa kedua pihak itu sebenarnya bersatu dan mempunyai tujuan yang sama yaitu menduduki Kashmir. Pakistan tidak percaya bahwa dengan syarat-syarat resolusi Dewan Keamanan menghasilkan plebisit yang adil dan netral terjamin, karena pemerintahan di Kashmir telah di bawah pimpinan Sheik Abdullah yang terang-terang memihak India. Meskipun demikian, kedua belah pihak tidak akan menolak Komisi Dewan Keamanan yang terdiri dari wakil-wakil Belgia, Colombia, Amerika, Ceko-Slovakia (yang ditunjuk India) dan Argentina (yang ditunjuk Pakistan). (TSG Mulia, 1959 : 271- 272).

Pada waktu mengadakan penyelidikan Komisi mengirim laporan kepada Dewan Keamanan disertai usul-usul mengenai penyelesaian pertikaian India dan Pakistan. Usul-usul itu menjadi dasar perjanjian Internasional antara India dan Pakistan yang diadakan pada 13 Januari 1949 yang diperkuat oleh Dewan Keamanan dalam resolusinya pada hari itu juga. Dalam perjanjian itu ditentukan :

- a. Kedua belah pihak akan menghentikan permusuhan dan menetapkan garis demarkasi untuk tentara masing-masing.
- b. Pakistan akan mengeluarkan gerombolan-gerombolan kabilah yang menyerbu kedalam negeri Kashmir dan pasukan-pasukan sukarela yang membantu Pakistan.
- c. Pakistan akan menarik seluruh tentaranya dari Kashmir dan India sebagian yang terbesar.
- d. Plebisit akan dilakukan di bawah pengawasan Badan Pelaksana Plebisit yang berhak menentukan kedudukan pasukan-pasukan yang akan tinggal dalam negeri Kashmir dan Jammu dan mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin supaya plebisit itu dapat berjalan dengan bebas dan tidak berat sebelah atau dipengaruhi oleh salah satu dari pihak yang berkepentingan. (TSG Mulia, 1959 : 272).

Fasal a dan b dapat dilaksanakan. Perintah-perintah untuk menghentikan permusuhan telah berlaku mulai 1 Januari 1949, garis-garis demarkasi antara pasukan-pasukan India dan Pakistan telah ditetapkan pada 1 Juli tahun itu juga. Gerombolan-gerombolan kabilah dan pasukan-pasukan sukarela sudah dikeluarkan dari Kashmir dan sejak satu setengah tahun tidak ada lagi permusuhan. Akan tetapi penarikan pasukan-pasukan dari negeri itu dan cara-cara mengatur plebisit timbullah pertentangan paham yang tajam sekali, sehingga Komisi UNCIP (*United Nation Comission For India and Pakistan*) sama sekali tidak dapat menjalankan tugas tersebut dalam fasal d. India tetap keberatan menarik tentaranya dan memberikan kuasa kepada Komisi dari Dewan Keamanan untuk mengatur plebisit. (TSG Mulia, 1959 : 273).

Struktur politik India yang dirancang Nehru memiliki 4 pilar, yaitu sekularisme, demokrasi, federalism, dan nasionalisme. Kashmir menjadi katub pengaman untuk pilar pertama dan keempat. Apabila Kashmir lepas, ambisi Nehru agar *all faith could live under the aegis of a secular state* dan upaya untuk menciptakan *homo Indicus* akan hancur berantakan. Kalkulasi politik domenstik semacam itu membuat plebisit untuk rakyat Kashmir tidak pernah diwujudkan India. Khawatir rakyat Kashmir lebih memilih bergabung dengan Pakistan

ketimbang India, pemerintah pusat di New Delhi malah mengeluarkan opsi baru, yaitu kehendak rakyat akan ditentukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih, bukan dengan plebisit. Opsi ini kemudian direalisasikan dengan melaksanakan pemilu lokal untuk menentukan anggota-anggota legislatif Kashmir akhir 1951. Dalam pemilu tersebut, suara mayoritas diraih faksi yang menjadi sekutu partai Konggres di Kashmir, yaitu *All Jammu and Kashmir National Conference* (AJKNC) pimpinan Sheikh Abdullah. Wakil-wakil rakyat terpilih ini kemudian meratifikasi Jammu dan Kashmir sebagai bagian integral India tanggal 6 Februari 1954. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 20-21).

Konferensi Nasional sebagai partai lokal terbesar, mengusulkan pada sidang agar diundang untuk ikut terlibat dalam menentukan masa depan dan afiliasi Negara tersebut. Pakistan meminta masalah tersebut diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB, sehingga dalam resolusi 30 Maret 1951 dinyatakan bahwa beberapa tindakan yang diusulkan badan konstituante Kashmir mengenai afiliasi masa depan Kashmir adalah tidak berguna. Pakistan keberatan terhadap persetujuan Nehru-Abdullah pada tahun 1952 tentang penerimaan artikel 370 sebagai status khusus. Lebih-lebih setelah badan konstituante menyatakan sebagai bagian India, karena ini akan membuat India tidak bersedia lagi mengadakan plebisit. Oleh Pakistan masalah ini diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 24 Januari 1957 ditegaskan kembali bahwa nasib Kashmir akan ditentukan melalui plebisit di bawah perlindungan PBB.

Usaha-usaha memaksa India untuk menaati resolusi PBB tidak pernah terlaksana. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi baru tanggal 24 Januari tahun 1957 mengulangi prinsip-prinsip dari resolusi sebelumnya yaitu resolusi tahun 1948, tahun 1950, tahun 1951 dan resolusi UNCIP tanggal 13 Agustus 1948 dan tanggal 5 Januari 1949 yang isinya menyatakan bahwa masa depan negara Jammu dan Kashmir harus diputuskan sesuai dengan kehendak rakyat yang dinyatakan melalui cara-cara yang demokratis dengan melaksanakan plebisit yang bebas dan tidak memihak di bawah pengawasan PBB. Namun resolusi PBB yang dikeluarkan berulang-ulang ini tidak pernah terlaksana karena India tidak pernah

*commit to user*

menaati badan PBB tersebut. (Zahir Khan, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=23032>, diunduh pada Jumat 4 Juni 2010).

Demikianlah persengketaan India dan Pakistan. Kedua belah pihak mempertahankan kepentingannya dengan sekeras-kerasnya, sambil mengemukakan alasan-alasan yang kuat. India tidak bersedia menarik pasukan-pasukannya karena berpendapat bahwa pemerintah yang ada di Jammu dan Kashmir yang dipimpin Sheikh Abdullah memang sudah menurut kehendak rakyat dan mempertahankan pula bahwa masalah itu adalah semata-mata masalah antara kedua negeri sediri, di mana negara lain tidak perlu campur tangan. India tetap memandang Pakistan sebagai penyerang yang harus melepaskan segala tuntutan sebelum diadakan plebisit. Rakyat Kashmir tidak suka lagi dipermainkan seperti tahun 1947 dan mereka menuntut kemerdekaan dan nasibnya. (TSG Mulia, 1959 : 274).

## **5. Perang India dan Pakistan**

### **a. Perang India-Pakistan 1947**

Setelah penguasa Kashmir bersepakat terhadap syarat Nehru dan menandatangani surat penyerahan penggabungan wilayah Kashmir dengan India (27 Oktober 1947) akhirnya terjadilah perseteruan awal Pakistan-India. Masing-masing menempatkan tentaranya di wilayah Kashmir sehingga meletuslah perang Kashmir pertama. Pakistan berhasil dipukul mundur hingga tinggal 1/3 wilayah yang dapat dipertahankannya, yang sampai sekarang disebut Azab Kashmir (Kashmir merdeka). Sedangkan 2/3 wilayah lainnya, Jammu-Kashmir berhasil diduduki India. (Dhurorudin Mashad, 1999 : 104).

Perang antara India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir terjadi pada tahun 1947 sampai 1948. Akibat perang ini mempengaruhi geopolitik kedua negara. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_India-Pakistan\\_1947](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_India-Pakistan_1947), diunduh pada Kamis 8 April 2010).

## b. Perang India-Pakistan 1965

Perang India-Pakistan 1965 disebut perang Kashmir kedua, yaitu perang antara India dan Pakistan pada Agustus 1965 sampai September 1965. Perang ini adalah pertempuran kedua antara India dan Pakistan terhadap wilayah Kashmir. Perang terjadi selama lima minggu, yang berakhir dengan ribuan korban jiwa pada dua belah pihak dan gencatan senjata oleh PBB. Perang dimulai dengan kegagalan Pakistan dalam operasi Gibraltar yang bertujuan untuk menyusupi dan menyerang Jammu dan Kashmir. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_India-Pakistan\\_1965](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_India-Pakistan_1965), diunduh pada Kamis 8 April 2010).

Perang kedua berakhir dengan dicapainya *agreement* antara India-Pakistan yang menyatakan penarikan seluruh kekuatan bersenjata kedua belah pihak selambat-lambatnya 25 Februari 1988 ke posisi terakhir masing-masing negara. Persetujuan ini membagi dua Kashmir, yaitu Azab Kashmir dan *Northern Territory* di bawah kekuasaan Pakistan. Sementara *Valley, Jammu, dan Ladakh* di bawah kekuasaan India. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 21).

Dalam perang 1947 dan 1965 yang memperebutkan Kashmir, India berhasil unggul, namun dalam perkembangannya waktu secara politis sebenarnya justru menderita banyak kerugian. Hal ini terlihat dari : Pertama, hubungan India-Pakistan selalu tegang. Kondisi ini tentu menyedot perhatian dan dana ekstra guna mengantisipasi kemungkinan pecahnya perang baru, yang sudah pasti akan jauh lebih besar. Padahal dana dan perhatian ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sektor sosial ekonomi negara yang masih tergolong miskin ini. Kedua, Kashmir telah pula menyebabkan semakin buruknya hubungan India dengan Negara-negara muslim. Karena setiap kemelut muslim di suatu negara, hampir dapat dipastikan akan menarik ikatan emosional muslim di lain negara. Hasilnya berbeda dengan kemelut Sikh yang gaungnya tidak terlalu luas, maka problem Kashmir selalu menggema di dunia Islam. Ketiga, kemelut Kashmir yang berkepanjangan akan berimplikasi pada kian sulitnya posisi India untuk mewujudkan ambisi sebagai pemimpin dunia ketiga. Termasuk pula keinginan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB sebagai wakil negara berkembang. India yang selama ini dianggap pionir bagi gerakan anti kekerasan (*ahimsa*), kini

justru dianggap mengesahkan sisitem kekerasan untuk menindas rakyat Kashmir. (Dhurorudin Mashad, 1999 : 107).

## **B. Muncul Gerakan Nasionalisme Kashmir**

### **1. Latar Belakang Muncul Gerakan Nasionalisme Kashmir**

Kashmir sebelum tahun 1586, merupakan wilayah merdeka yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri. Kekuasaan tersebut memungkinkan Kashmir untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Pada masa itu pemerintahan semuanya dipegang oleh warga Kashmir, bukan oleh etnik atau kekuatan luar lainnya. Masa kejayaan ini berakhir menginjak tahun 1586. Sesudah tahun 1586 Kashmir kehilangan kemerdekaan karena sejak tahun itu rakyat Kashmir tidak pernah lagi memegang kekuasaan secara langsung. Kashmir silih berganti dipegang kekuatan-kekuatan dari luar, yaitu : dinasti mughal, Sikh, Hindhu Dogra, dan kolonial Inggris. Pemerintahan Kashmir ini hampir semuanya berlangsung secara otoriter dan diskriminatif. Peralihan kekuasaan dari satu kekuatan ke kekuatan lainnya tidak pernah memperhatikan aspirasi rakyat Kashmir. Dalam catatan sejarah, transfer kekuasaan dari pemerintahan Sikh ke tangan Hindhu Dogra berlangsung dengan proses yang menyakitkan hati. Kekuasaan atas wilayah dan penduduk Kashmir berpindah tangan melalui jual beli antara penguasa Sikh dan Hindhu Dogra. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 26).

Berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris tidak berarti berakhirnya penjajahan Inggris. Pemerintah India yang kemudian menduduki Kashmir atas permintaan Maha Raja Hari Singh (penguasa terakhir Hindhu Dogra) dianggap malah melanjutkan penjajahan. Persepsi demikian semakin kuat ketika keinginan rakyat Kashmir ber-aksesi dengan Pakistan selalu digagalkan oleh pemerintah India dengan menunda-nunda plebisit yang tertuang dalam resolusi PBB No.1196. Pemerintah India malah kemudian mempertahankan Kashmir sebagai bagian Integral India tanpa pernah meminta pendapat rakyat Kashmir secara langsung atau plebisit. Proses pengambilan keputusan untuk integrasi tersebut hanya

melibatkan anggota-anggota parlemen negara bagian Jammu dan Kashmir yang kemudian meratifikasinya atas nama penduduk Jammu dan Kashmir.

Bentuk lain penjajahan yang dipersepsikan dilakukan oleh India adalah tidak dipenuhinya janji pemerintahan di New Delhi pada awal kemerdekaan. Janji pemerintah india untuk memberi otonomi penuh pada Jammu dan Kashmir dalam kenyataannya tidak pernah terwujud. Meski diberi kesempatan untuk menyusun pemerintahan sendiri yang berasal dari warga Kashmir, dalam prakteknya Jammu dan Kashmir tidak pernah lepas dari campur tangan pusat dan tidak pernah menikmati kebebasan dalam menjalankan kekuasaan. Pengalaman pahit sebagai bangsa terjajah menyebabkan penduduk muslim Jammu dan Kashmir meyakini mereka punya agenda politik yang berbeda dengan komunitas-komunitas (termasuk komunitas muslim) lainnya di India. Apabila kelompok-kelompok lainnya melancarkan perjuangan menentang pusat sekedar menuntut otonomi, pengalamam sebagai bangsa terjajah menumbuhkan kesadaran bagi penduduk muslim Jammu dan Kashmir bahwa kemerdekaan merupakan solusi yang terbaik. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 26-27).

Kesadaran Kashmir untuk merdeka terbentuk dari proses yang mereka alami di masa lalu. Pertama, oleh pengalaman panjang yang menyakitkan sebagai bangsa terjajah. Kedua, keyakinan rakyat Kashmir yang diwariskan secara turun temurun bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok-kelompok etnik lain di India.

Kesadaran penduduk Muslim Jammu dan Kashmir bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dari kelompok-kelompok etnik lain di India ikut memperkuat keinginan untuk merdeka. Warga Kashmir dibungkus oleh identitas yang dikenal dengan istilah *Kashmiriyat* (Kashmiriness). Identitas ini menunjukkan keistimewaan Kashmir dalam hal agama, bahasa, dan teritori. Keistimewaan ini menyebabkan seseorang dianggap memiliki identitas Kashmir apabila ia beragama Islam, memakai bahasa Kashmiri, dan berasal dari wilayah Kashmir atau lahir dari keturunan Kashmir.

Bagi rakyat Kashmir ada tiga alasan mengapa mereka menampilkan identitas territorial. Pertama alasan sejarah. Fakta sejarah membuktikan bahwa

penduduk yang ada telah berdiam di wilayah Kashmir berpuluh-puluh generasi, sehingga dalam pandangan mereka pemilik sah wilayah tersebut adalah penduduk Kashmir. Kedua, alasan politik. Fakta politik menunjukkan bahwa Kashmir tidak pernah menjadi bagian atau ekstention dari negara lain. Rakyat Kashmir tidak pernah menjual wilayah, menyerahkan, atau memutuskan berintegrasi dengan negara lain. Kashmir pernah menjadi bagian negara lain karena pendudukan atau penjajahan. Dengan demikian, teritori Kashmir milik sah rakyat Kashmir, bukan milik negara yang menduduki. Ketiga, alasan kultural. Kashmir selama berabad-abad hidup dalam isolasi geografis. Isolasi ini menyebabkan pengaruh asing tidak banyak masuk ke dalam masyarakat Kashmir. Minimnya pengaruh asing bermakna positif bagi perkembangan budaya di Kashmir. Wilayah ini akhirnya memiliki nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan pranata-pranata sosial yang khas, yang identik dengan penduduk Kashmir. Karena sudah menjadi identitas khas, yang identik dengan penduduk Kashmir, Disamping itu penduduk Kashmir beranggapan bahwa unsur-unsur kultural tersebut perlu dijaga dan dipertahankan. Cara efektif untuk mempertahankan adalah dengan melakukan pemagaran atas wilayah Kashmir. Bagi rakyat Kashmir tiga macam identitas diatas merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Rakyat Kashmir menghendaki hukum dan lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada bisa mendukung mereka dalam mempertahankan identitas-identitas tersebut. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 29).

Penindasan yang dilakukan India semakin menguatkan semangat Muslim Kashmir untuk merdeka. Sosiolog Pakistan, Akbar S. Ahmed (1993), melukiskan kondisi mengenaskan Kashmir sebagai berikut:

Kashmir benar-benar diabaikan India. Tidak mempunyai unit industri besar. Kultur dan bahasa Kashmir dibiarkan merana. Hampir tidak pernah ada pemilu yang bebas dan adil. Janji-jani plebisit telah dilupakan. Peluru dan tongkat komando terlalu sering digunakan pasukan India. Cerita-cerita tentang penganiayaan dan pemerkosaan terlalu biasa terdengar. Seorang pria bokongnya dilubangi dengan bor listrik selama diinterogasi polisi paramiliter. Seorang pria lagi dilemparkan ke bak mandi yang airnya dialiri aliran listrik. Dan ada lagi yang kemaluannya dipotong dengan pisau. (Kashmir, Surga Dunia yang Membara, <http://zonaislam.com/?p=92>, diunduh pada Jumat, 11 Juni 2010).

Ditopang selama pendudukan India, Muslim Kashmir menyadari menjadi bagian dari India bukanlah solusi yang tepat untuk Kashmir karena keinginan penduduk untuk menegakkan identitas Islam, mempertahankan bahasa yang dipakai, dan berkuasa atas wilayah yang menjadi *historic homeland* bagi mereka, sangat tidak mungkin dicapai melalui negara sekuler seperti India, yang dalam kenyataannya didominasi Hindhu dan menghendaki adanya keseragaman hukum dan lembaga-lembaga politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bagi rakyat Kashmir solusi yang paling tepat untuk bisa mewujudkan keinginannya adalah menuntut kemerdekaan.

## **2. Gerakan Nasionalisme Kashmir**

Di Kashmir gelombang naiknya nasionalisme etnik pertama kali berlangsung dalam kurun waktu 1947-1977. Selama kurun waktu ini terjadi mobilisasi besar-besaran. Mobilisasi ini terjadi karena kelompok-kelompok pejuang melakukan politisasi besar-besaran atas isu Kashmir dengan memanfaatkan kondisi psikologis penduduk Kashmir, kondisi politik, sosial domestik yang mereka hadapi, dan situasi serta dukungan internasional. Kala itu penduduk muslim Kashmir memiliki sentimen primordial yang tinggi yaitu ingin bergabung dengan Pakistan yang penduduknya sama-sama muslim dan aktif mendukung perjuangan mereka. Pada saat yang sama mereka berhadapan dengan kebijakan politik India yang diskriminatif dan intervensionis. Akibat politisasi ini nasionalisme kelompok-kelompok pejuang Kashmir akhirnya mendapat tanggapan secara luas dari penduduk muslim Kashmir. Selama kurang lebih 30 tahun termobilisasi, nasionalisme Kashmir memasuki masa surut atau periode demobilisasi. Fase ini berlangsung singkat, yaitu antara tahun 1977 dan 1984. Pada fase ini dukungan terhadap perjuangan nasional sangat jauh merosot. Kemosrotan ini tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi yang dihadapi rakyat Kashmir ketika itu. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 155).

Setelah bentrokan kedua (1965), India sudah menduga, Pakistan akan mencari dukungan negara-negara lain, terutama negara-negara Islam atas nama

solidaritas Islam. Untuk menghindari hal itu, India menyodorkan perjanjian Simla (Juli 1972). Dalam perjanjian ditetapkan, Kashmir adalah urusan India dan Pakistan, dan oleh karenanya akan diselesaikan secara bilateral. Pihak lain tidak boleh ikut campur tanpa persetujuan India-Pakistan. Merasa tertipu, Pakistan “pinjam tangan” kelompok-kelompok separatis Kashmir yang anti India, dan melakukan penyusupan ke wilayah Kashmir, namun Pakistan berpendapat bahwa perlawanan masyarakat Kashmir sepenuhnya berkarakter pribumi dan Pakistan hanya mendukung gerakan perlawanan secara moral. (Dhurorudin Mashad, 2006 : 84).

Setelah bentrokan yang terjadi pada tahun 1965, wilayah Kashmir yang diklaim oleh India dan Pakistan, tetap belum terpecahkan. tetapi baik Pakistan dan India menerima tawaran Soviet untuk menengahi sengketa tersebut. Ayub Khan dan Shastri akhirnya menerima undangan tersebut di tanah Rusia, tepatnya di Tashkent. (Deseret News, Wednesday 22 September 1965). Dalam pertemuan itu Ayub Khan mengatakan :

The Security Council had been warned that if some method is not evolved there will be a much wider conflict. He said the council had assured Pakistan that steps would be taken to resolve the Kashmir dispute but did not specify what steps”. Thanked the Chinese Communist, Indonesia, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Jordan and Syria for extending support to Pakistan in its fight against India said, China’s moral support will forever remain enshrined in our hearts. Pakistan is indebted to them. (Deseret News, Wednesday 22 September 1965).

Ayub Bahadur Sastri mengadakan pembicaraan untuk penyelesaian perang pada tanggal 3-10 Januari 1966. Pembicaraan itu menghasilkan perjanjian Tashkent yang isinya menyerukan kedua negara menarik pasukannya dari garis senjata, memperbaiki hubungan menjadi normal kembali, menghentikan propaganda perang dan segera diadakannya pembicaraan tentang masa depan Kashmir. Persetujuan dapat diartikan kedua negara menyerahkan kembali wilayah yang dirampasnya waktu perang dan mengembalikan status quo dimana 2/3 dikuasai India dan selebihnya Pakistan. Akibat diterimanya persetujuan Tashkent, Ayub mendapat kecaman dari lawan-lawan politiknya terutama Z.A Bhutto, karena saat itu sayap kanan anti India pimpinan Ali Bhutto sedang mendominasi

opini publik di Pakistan. Opini yang berkembang adalah Ayub telah menjual Pakistan dalam persetujuan tersebut. Ayub menghadapi dilema antara menyelesaikan normalisasi atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan melindungi keamanan rakyat, namun belum sempat membicarakan penyelesaian masalah Kashmir, Bahadur Sastri meninggal dunia.

Bahadur Sastri diganti oleh Indira Gandhi. Masa pemerintahan Indira Gandhi hubungan kedua Negara tetap kurang harmonis. Intervensi India di Pakistan Timur menyebabkan kontak senjata terjadi lagi. Dalam Perang India-Pakistan tahun 1971, Bangladesh meminta kemerdekaan dari Pakistan. Tentara Pakistan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan besar di Bangladesh, Jutaan pengungsi pindah ke India. Perang ini kemudian diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Simla 1972. Pakistan mengalami banyak kerugian karena kehilangan hampir separo jumlah penduduknya dengan terciptanya Bangladesh merdeka. ([http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_India-Pakistan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_India-Pakistan), diunduh pada Kamis 8 April 2010).

Di bawah perjanjian Simla, garis kendali atau LOC (*Line of Control*) disempurnakan (sebelumnya, setelah berakhirnya bentrokan pertama 1947, kedua pihak membuat garis demarkasi yang berlaku mulai Januari 1949). LOC membagi Kashmir menjadi dua, wilayah Kashmir India yang dua pertiga bagian Timur dan Selatan, serta wilayah Kashmir Pakistan di Utara dan Barat. Perjanjian Simla juga menepis kemungkinan opsi ketiga, referendum masa depan Kashmir oleh rakyat Kashmir sendiri. Inilah yang membuat kelompok-kelompok separatistis di Kashmir terjebak atau menjadi korban kekerasan. Kelompok-kelompok ini mulai berkembang pesat setelah terjadi penyusupan besar-besaran kekuatan muslim pro-Pakistan ke Kashmir India pada 1989. Jika sebelumnya hanya ratusan kelompok, maka dalam waktu lima tahun, jumlahnya sudah mencapai ribuan kelompok. (Dhurorudin Mashad, 2006 : 85).

Meredanya konflik tidak bisa dilepaskan dari situasi dan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi rakyat Kashmir ketika itu. Pada sisi eksternal, perjanjian Simla yang ditandatangani India-Pakistan, yang dalam salah satu klausalnya mengakui pembagian Kashmir dan menyatakan masalah Kashmir akan

diselesaikan sendiri oleh pemerintah India dan Pakistan, telah menggeser masalah Kashmir menjadi masalah bilateral. Konsekuensi dari perjanjian tersebut adalah masalah Kashmir bukan lagi masalah antara rakyat Kashmir dengan India tetapi menjadi masalah antara India dengan negara Pakistan. Pada sisi internal, menginjak tahun 1977 tumbuh keyakinan pada sebagian besar rakyat Kashmir bahwa demokrasi berjalan di Jammu dan Kashmir. Ada harapan bahwa tuntutan rakyat Kashmir akan bisa dipenuhi lewat prosedur yang demokratis. Keyakinan tersebut tumbuh berkat terselenggaranya dua kali pemilu yang bebas dan jujur di Jammu dan Kashmir. Pada pemilu yang menandai berakhirnya pemerintahan darurat Indira Gandhi, AJKNC (*All Jammu and Kashmir National Conference*) meraih kemenangan di Jammu dan Kashmir dengan mengalahkan partai-partai nasional yang besar. Keyakinan rakyat Jammu dan Kashmir hampir kembali meningkat ketika tahun 1983 partai kongres kalah dalam pemilu lokal di Jammu dan Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 22).

Faktor internal lainnya yang menunjang meredanya konflik adalah kepemimpinan politik di tangan sipil yang berlangsung baik dan jujur serta tidak banyak dicampuri pemerintah pusat di New Delhi. Kondisi politik ini menjadi iklim yang bagi sektor ekonomi dan perdagangan, khususnya pariwisata yang menjadi andalan Jammu dan Kashmir. Konsekuensinya adalah warga Jammu dan Kashmir bisa menikmati kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Gerakan atau kelompok perlawanan di Jammu dan Kashmir muncul kembali setelah sempat kehilangan dukungan selama kurang lebih 10 tahun. Awal kemunculannya adalah ketika situasi politik memburuk di Jammu dan Kashmir menyusul dicopotnya Farooq Abdullah dari kekuasaan Juli 1984 dan menangnya partai kongres pada dalam pemilu 1986. Farooq kembali berkuasa pada tahun 1987.

Farooq Abdullah merupakan pemimpin politik terkenal dari Jammu dan Kashmir. Farooq menjadi Presiden Konferensi Nasional pada tahun 1981 dan kemudian menjadi Ketua Menteri Jammu dan Kashmir. ([http://www.maxabout.com/politics/p\\_leaders/farooq\\_abdullah.aspx](http://www.maxabout.com/politics/p_leaders/farooq_abdullah.aspx), diunduh pada Rabu 9 Juni 2010).

Pada tahun 1980-an jumlah kelompok muslim Kashmir semakin bertambah karena muslim Kashmir diasingkan oleh pemilu yang curang, korupsi yang merajalela, dan kegagalan pemerintah pusat untuk membantu pembangunan ekonomi negara mereka, dan semakin banyak menanggapi tuntutan kelompok nasionalis atas pembebasan Kashmir dari India yang hindhu. (Robert L.Hardgrave, Jr yang dikutip Larry Diamond dan Marc F.Plattner, 1998 : 100).

### C. Perjuangan Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai

#### Tahun 1990

##### 1. Kebangkitan Nasionalisme Kashmir

Kesadaran rakyat Kashmir untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya sudah mulai sejak tahun 1931. Untuk memperbaiki keadaan, penduduk muslim melakukan gerakan protes yang populer dengan istilah *Tehreek-i-jihad*. Protes ini berakhir dengan pembantaian terhadap pihak keamanan oleh pihak muslim. Menanggapi peristiwa ini pemerintah kolonial membentuk *Glancy Commission*. Komisi ini bekerja dan membuahkan sejumlah rekomendasi untuk mereformasi sistem yang ada. Salah satunya adalah dibukanyakeran partisipasi politik dan kebebasan membentuk partai politik. Bagi penduduk Kashmir perkembangan ini menandai dimulainya kesempatan bagi mereka untuk membuka mata pemerintah kolonial dan dunia akan diskriminasi dan penindasan yang berlangsung di Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 17).

Cara yang ditempuh saat itu menuntut berdirinya partai politik. Pada awalnya hanya partai politik yang mewakili Hindu yang diijinkan berdiri padahal mayoritas penduduknya muslim. Pada tahun 1932 didirikan Konferensi Muslim di Jammu-Kashmir dibawah pimpinan Syeikh Abdullah. Dalam perjalanannya partai ini mengalami perpecahan akibat pengaruh perpecahan Kongres-Liga. Partai ini pecah menjadi dua yakni Konferensi Muslim yang berafiliasi ke Liga dan Konferensi National berafiliasi ke Konggres.

Sebenarnya para pemimpin Hindu dan Islam semuanya menginginkan dibentuknya suatu front persatuan, namun masalah agama adalah bagian integral dari dua budaya tradisional besar, sumber kekuatan yang mengilhami, menjamin,

juga mempertahankan identitas dan jalan hidup mereka. Perbedaan antara Hindu dan Muslim akhirnya mengalahkan rasa persatuan. Khususnya orang-orang Islam yang menyadari hak mereka dalam suatu negara Hindu yang luas dan sekuler. Oleh karena itu walaupun Ali Jinnah dan Liga Muslim telah bekerjasama dengan Partai Kongres dan pemimpinnya (Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi), menjelang tahun 1940 Jinnah mulai berbicara tentang dua negara di India yaitu Muslim dan Hindu :

Sangatlah sulit untuk memahami mengapa saudara-saudara kita Hindu tidak bisa mengerti dengan sebenarnya sifat Islam dan Hinduisme. Mereka memanglah tidaklah religius dalam artian yang ketat, tetapi pada kenyatannya memang mempunyai susunan dan tatanan sosial yang berbeda. Mimpi saja kalau Hindu dan Islam bisa menyusun suatu bangsa dan negara bersama dan kesalahpahaman tentang suatu bangsa India ini semakin jauh. Orang Hindu dan orang Islam adalah bagian dari dua filsafat agama, adat istiadat, dan literature yang berdasarkan pada dua ide dan konsep yang saling bertentangan. Aspek hidup dan kehidupan mereka berbeda. Sangatlah jelas bahwa orang Hindu dan orang Islam mengambil inspirasi mereka dari sumber sejarah yang berbeda. Untuk mengaduk keduanya di dalam satu negara, yang satu berjumlah mayoritas dan yang lain minoritas, akan menimbulkan ketidakpuasan dan kehancuran bagi kesatuan yang dibangun untuk kepentingan negara itu. (Hans J Morgenthau, 1990 : 276-277).

Jinnah dan Liga Muslim menggunakan simbol-simbol dan slogan untuk menggerakkan menuntut negara terpisah, satu tanah air Muslim, dimana orang-orang Islam bisa bebas melaksanakan jalan hidup mereka. Cita-cita mereka terwujud pada 15 Agustus 1947 ketika anak benua India tersebut dipecah dua negara terpisah, yaitu India ibukota New Delhi dan Pakistan ibukota Karachi. Amanat Jawaharlal Nehru dalam sidang konstituante pada tanggal 15 Agustus 1947 pada tengah malam sebagai berikut :

Telah lama kami membuat janji dengan diri kami dan sekarang waktunya tiba, ketika kami harus menebus janji kami. Tidak keseluruhan atau dengan langkah pasti, tetapi sangat mendasar. Pada tengah malam dunia tidur, India akan bangun untuk kritik yang picik dan bersifat merusak, bukan waktu untuk mendendam atau mengalahkan yang lain. Kami harus membangun rumah yang besar, yang mulia dari kebebasan India dimana anaknya boleh tinggal. (Isnaini, 2000 : 160).

Pemisahan dua negara tersebut menimbulkan masalah penggabungan negara-negara bagian termasuk Kashmir. Masalah Kashmir sangat berkaitan dengan pemisahan India dan Pakistan. Sementara pemisahan tidak dapat terpisahkan dengan dinamika hubungan Hindu-Islam, karena lahirnya Pakistan merupakan manifestasi minoritas muslim dalam menuntut hak-haknya dengan mendirikan sebuah negara yang khusus untuk umat Islam di subkontinen.

Perjuangan rakyat Kashmir berlangsung terus hingga pemerintah Inggris melaksanakan proses dekolonisasi usai perang Dunia ke II terhadap jajahannya termasuk India. Setelah pemerintah Inggris mengalami krisis berat terutama dalam bidang keuangan, Hinduisasi, ketidakadilan dalam berbagai bidang kehidupan, kekejaman dan pembunuhan dari penguasa Hindu mengakibatkan umat Islam India tidak mungkin lagi untuk hidup berdampingan dengan penganut agama Hindu dalam satu negara kesatuan. Keadaan seperti itulah yang menimbulkan keinginan kuat di kalangan umat Islam India pada masa itu, untuk memisahkan diri dan mempunyai tempat sendiri bagi mereka, sehingga mereka dengan bebas dapat menata kehidupannya berdasarkan keyakinan mereka tanpa adanya tekanan dan perlakuan diskriminatif dari pihak lain. (Zahir Khan, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=23032>, diunduh pada Jumat, 4 Juni 2010).

Konstitusi 1950, pasal 370 memberi hak khusus kepada Jammu dan Kashmir. Pemerintah pusat hanya memegang kekuasaan atas masalah pertahanan, luar negeri, dan komunikasi. Di luar itu, segala sesuatunya berada di bawah control Negara bagian Jammu dan Kashmir. Peran khusus dan otonomi Kashmir ini ditegaskan kembali oleh Nehru kepada Abdullah tahun 1952. Ironisnya, tidak lama berselang setelah penegasan tersebut New Delhi malah mencopot Abdullah dari kekuasaannya.

Penggerogotan terhadap hak khusus Jammu dan Kashmir terjadi pada tanggal 15 Mei 1954, ketika pemerintah pusat mengeluarkan Constitutional Order 1954 yang isinya memperbesar kekuasaan pusat melampaui tiga macam kekuasaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi 1950. Meski pada tahun 1971 Indira Gandhi pernah menjanjikan untuk meninjau kembali segala ketentuan perundangan yang merugikan Jammu dan Kashmir sejak 1953, dalam

kenyataannya hak konstitusi yang diberikan untuk Jammu dan Kashmir tidak pernah dipulihkan. Peluang untuk memperoleh kembali hak konstitusi tersebut semakin hari malah semakin tertutup. Terutama sejak pemerintah pusat memberlakukan *Governor's Rule* atas Jammu dan Kashmir selama beberapa bulan pada tahun 1984, yang kemudian diberlakukan kembali mulai Januari 1990. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 33).

Sebuah organisasi didirikan tahun 1987 untuk mewujudkan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Kashmir. Para pegawai organisasi ini digaji oleh pemerintah pusat (Pakistan), serta pemerintahan Azad Kashmir. Di Mirpur kegiatan politik dan agama dipenuhi oleh coretan dan poster anti-India. Sejumlah poster mengutuk Perjanjian Shimla. Sebuah kutipan ayat Quran, yang mendorong manusia untuk bangkit, terpampang pada spanduk besar. Suasana yang emosional terus mengalir menguasai hampir setiap aspek kehidupan di Azad Kashmir. Di desa-desa, prosesi anti-India hampir menjadi upacara sehari-hari. Orang-orangan yang mereka sosokkan sebagai V.P. Singh (Perdana Menteri India) selalu dibakar dan dipukuli tongkat. Para pelajar yang membawa plakat dan spanduk besar menunggu di jalan-jalan, meminta sumbangan dari siapa pun yang lewat untuk "dana jihad" bagi kemerdekaan Kashmir. Seruan serupa menggema dari masjid-masjid. Setiap Jumat, setelah salat Jumat, ceramah pun diberikan lagi untuk menyeru ke jalan jihad. "Sekarang atau tidak sama sekali" teriak sang penceramah lewat pengeras suara. (Tempo, 5 Mei 1990).

Sejak tahun 1990, sedikitnya 17.000 rakyat Kashmir menjadi korban Tentara Keamanan Perbatasan (*Border Security Forces/BSF*), yang diperkuat dengan lebih dari 150.000 personel, termasuk 100.000 tentara. Suatu jumlah yang terlalu besar jika dibandingkan dengan kaum militan yang menurut perkiraan New Delhi hanya tinggal 10.000 kaum militan yang terpecah-pecah ke dalam banyak kelompok aktif. Cukup masuk akal jika India mengklaim telah dapat mematahkan kekuatan kaum militan, sehingga mereka tidak lagi mampu mengganggu stabilitas secara berarti. Ketua BSF di Kashmir E.N.Rammohan secara tegas menyatakan betapa personelnnya telah mampu menguasai wilayah Kashmir seluruhnya. Namun klaim demikian masih sangat disangsikan, mengingat personel BSF yang

beroperasi di Kashmir sebenarnya tak berkemampuan untuk mengatasi situasi dan kondisi kemelut ala Kashmir. Apalagi mengingat bahwa situasi kota-kota di Kashmir ,khususnya Srinagar memang sangat unik, dengan banyaknya lorong-lorong kecil dan jalan-jalan belakang. Pola tata kota sedemikian jelas sangat membantu kaum militan Kashmir untuk melancarkan serangan atau menghindar dari pengejaran personel BSF. Apalagi kaum militan ini berbaur dalam kehidupan kota, serta dukungan oleh mayoritas masyarakat, sehingga sangat sulit untuk mengenali siapa masyarakat sipil dan siapa pemberontak. Pola perlawanan tersebut mnyebabkan milite India frustasi, sehingga sering melakukan penembakan ngawur terhadap masyarakat sipil. (Dhurorudin Mashad, 1999 : 112).

## **2. Perjuangan Nasionalisme Kashmir Sampai Tahun 1990**

### **a. Perjuangan tahun 1947-1954**

Pada tahun 1940 Kashmir sempat memiliki bendera dan Perdana Menteri sendiri, tetapi karena alasan invasi tentara Pakistan ke Kashmir, para pemimpin Kashmir terpaksa minta perlindungan India dan menyerahkan Kashmir sebagai bagian dari wilayah India. Setelah India dan Pakistan merdeka dari Inggris pada 15 Agustus 1947 Syeikh Abdullah menuntut agar Kashmir berdaulat, berdiri sendiri. (Dhurorudin Mashad, 2006 : 86).

Selama pemisahan India dan Pakistan Syeikh Abdullah menguasai Kashmir dalam kudeta 1947. Tanggal 19 Juli 1947 penduduk Muslim menyatakan keputusan resmi, tidak bergabung dengan negara mana pun alias tetap berdiri sendiri, namun penguasa Kashmir saat itu, Maharaja Hari Singh, merasa keberatan, dan menggabungkan Kashmir ke dalam India berdasarkan “Perjanjian Asemi” tanggal 26 Oktober 1947. Pada tahun 1948, Syeikh Abdullah ditunjuk sebagai Administrator Darurat dan kemudian menjadi Perdana Menteri Jammu dan Kashmir. Beliau menghendaki kemerdekaan Kashmir, dan menentang penggabungan Muslim ke Pakistan. Oleh Karena itu Syeikh Abdullah ditangkap kemudian dipenjara. (<http://zonaislam.com/?p=92>, diunduh pada Selasa, 29 Juli 2010).

Contoh tindakan Umat Hindhu yang memancing kemarahan muslim adalah Pada tanggal 22 Desember 1949 sekelompok umat Hindu memasuki masjid pada malam hari serta memasang patung dewa Rama. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan kemarahan Muslim. Akibat peristiwa ini pemerintah India yang mayoritas Hindhu mengambil kebijakan menutup masjid Babri, yang berarti pula qaram Muslim tidak dapat melakukan ibadah di dalamnya. Kaum Muslim tidak puas dengan keputusan pemerintah, sehingga menggugat lewat peradilan, namun langkah yuridis (Januari 1950-April 1955) ini dikalahkan oleh peradilan Ayodya justru memperkokoh putusan pemerintah. Pengadilan malah menolak patung Dewa Rama dari dalam Masjid. (Dhurorudin Mashad, 1999 : 52).

Kashmir akhirnya menjadi sebuah simbol bagi identitas nasional India dan Pakistan, sehingga menciptakan berbagai kendala dalam urusan politik dalam negeri serta membuat sulit bagi terwujudnya kompromi apapun bagi India Pakistan. Pada satu sisi Pakistan mempertanyakan legalitas pencaplokan oleh India setelah peristiwa pemisahan tahun 1947. Islamabad menuduh New Delhi mengingkari resolusi PBB tentang plebisit untuk menentukan kebendak rakyat Kashmir. Pada sisi lain, India beranggapan bahwa pencaplokan Kashmir tahun 1947 merupakan suatu hal yang legal dan final. (Dhurorudin Mashad, <http://katalog.pdi.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/24202421.pdf>, Diunduh pada Kamis 1 Juli 2010).

Selain stategi konstitusi, Kashmir juga dikendalikan melalui jaring Kashmir pro New Delhi, seperti melalui pelaksanaan pemilu lokal 1951 Pemilu ini dimenangkan Syeikh Abdullah, seorang politisi Kashmir Konferensi Nasional yang lebih pro India dan memilih Kashmir sekuler. Pada tanggal 8 Agustus 1953 beliau diberhentikan sebagai Perdana Menteri, karena kehilangan kepercayaan. Sheikh Abdullah segera ditangkap dan kemudian dipenjara selama sebelas tahun, dituduh konspirasi terhadap negara dalam skandal konspirasi kasus Kashmir. (DhurorudinMashad,<http://katalog.pdi.lipi.Go.id/index.php/searchkatalog.downloadDataById/2420/2421.pdf>, Diunduh pada Kamis 1 Minggu 2010).

## b. Perjuangan tahun 1954-1977

Penggerogotan terhadap hak khusus Jammu dan Kashmir terjadi pada tanggal 15 Mei 1954, ketika pemerintah pusat mengeluarkan *Constitutional Order* 1954 yang isinya memperbesar kekuasaan pusat melampaui tiga macam kebiasaan sebagaimana tercantum dalam konstitusi 1950. Dalam kenyatannya hak koostitusi yang diberikan untuk Jammu dan Kashmir tidak pernah dipulihkan. Peluang untuk memperoleh kembali hak konstitusi tersebut semakin hari malah semakin tertutup. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 33)

Masalah Kashmir dibicarakan kembali pada tahun 1955 di New Delhi, tetapi tidak mencapai hasil yang memuaskan. Tahun 1956, Dewan Rakyat Kashmir memproklamasikan Kashmir sebagai bagian integral dari negara federal India. Kalau New Delhi menjadikan status Kashmir sebagai "negara bagian", maka Islamabad menjadikannya sebagai provinsi kelima. Islamabad menempatkan pejabat setingkat menteri, untuk mengurus administrasi kawasan Azad Kashmir. Azad Kashmir, atau Kashmir yang bebas, merupakan kawasan bagian barat yang dikuasai Pakistan. Sedangkan bagian Timur mencakup Jammu, Lembah Kashmir, dan Ladakh dijaga pasukan India. Pembagian ini merupakan kesepakatan gencatan senjata tahun 1949. ([http://azizsutan.blogspot.com/2002/J\)6J\)1\\_archive.html](http://azizsutan.blogspot.com/2002/J)6J)1_archive.html), Diunduh pada Jumat 18 Juni 2010).

Di tahun 1957 negara bagian Jammu dan Kashmir bergabung dengan negara kesatuan India dibawah sebuah perlembagaan baru. Pada tanggal 8 April 1964 Syeikh Abdullah dibebaskan dari tahanan dan kembali ke Srinagar di mana beliau diberikan suatu sambutan belum pernah terjadi. Setelah dibebaskan Beliau berdamai dengan Nehru . Nehru dan Sheikh Abdullah diminta untuk bertindak sebagai jembatan antara India dan Pakistan. Presiden Ayub setuju untuk datang ke New Delhi untuk pembicaraan akhir untuk solusi dari masalah Kashmir. Namun sebelum rencana pertemuan terlaksana, Nehru meninggal dunia. Kegagalan penyelesaian masalah Kashmir mendorong India semakin kuat mempertahankan Kashmir. Hal ini menimbulkan protes dan sampai akhirnya perang terjadi tahun 1965.

Dalam perang tahun 1965 India menguasai lembah diantara Dras dan sungai Sum. Dalam perspektif rakyat Kashmir sendiri ternyata kerangka agama tak cukup kuat untuk menarik loyalitas dan dukungan masyarakat Kashmir terhadap Pakistan. Hal ini seperti terrefleksi dari gagalnya strategi yang diterapkan Islamabad pada perang 1965. Pakistan melancarkan Operasi Gibraltar yang dibagi dalam dua phase: pertama, tentara Pakistan menyamar sebagai suku-suku lokal lantas menyeberang perbatasan dan membuat ulah pemberontakan. Kedua, tentara resmi Pakistan lantas mengambil kesempatan terhadap situasi Kashmir yang kacau dengan menginvasi melalui serangan singkat dan mendadak, lantas menyerukan gencatan senjata untuk melaksanakan plebisit. Tatkala infiltrasi dimulai, masyarakat Kashmir ternyata tak bersikap kooperatif, dapat dimengerti jika pelaksanaan fase kedua pada September 1965 pun akhirnya mengalami kegagalan. Apalagi India kala itu membuat kejutan, tak hanya melakukan perlawanan yang hebat, tetapi bahkan menyeberang garis gencatan senjata yang akhirnya kini dikenal sebagai batas internasional India - Pakistan di Selatan. Perang di era kepemimpinan Lal Bahadru Shastri dan Ayub Khan baru berhenti pada Januari 1966 melalui *Taskent Agreement* dengan kemenangan bagi India. Peristiwa itu memperlihatkan bahwa argumentasi keagamaan ternyata tak cukup kuat menumbuhkembangkan dukungan rakyat Kashmir terhadap Pakistan. Namun, dibalik sikap kontra Kashmir terhadap Islamabad, bukan lantas lebih pro India. Justru mayoritas rakyat Kashmir dari waktu ke waktu memperlihatkan sikap and India. (Dhurudin Mashad, <http://katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2420/2421.pdf>, Diunduh pada Kamis 1 Juli 2010).

Setelah kematian Nehru pada tahun 1964, Syeikh Abdullah diasingkan India pada tahun 1965-1968 dan pada tahun 1971 diasingkan dari Kashmir selama 18 bulan. Hal ini diduga dilakukan untuk mencegah dia memperjuangkan Kashmir dan front Referendum yang didukung oleh dia untuk mengambil bagian dalam pemilihan umum di Kashmir. Pada tahun 1974, Abdullah menandatangani Accord Kashmir dengan Indira Gandhi dimana Kashmir meletakkan sebagai konstituante India, kemudian Syeikh Abdullah menjadi ketua Menteri Negara.

([http://www.maxabout.com/politics/p\\_leaders/sheikh\\_mohammad-abdullah.aspx](http://www.maxabout.com/politics/p_leaders/sheikh_mohammad-abdullah.aspx), diunduh pada Kamis 1 Juli 2010)

### c. Perjuangan tahun 1977-1990

Ketegangan di Kashmir sedikit mereda memasuki tahun 1977. Meski tindak kekerasan, demonstrasi, pemogokan dan boikot terkadang masih berlangsung, namun frekuensinya berkurang drastis dibanding periode 1954-1977. Situasi ini dikatakan sebagai jeda konflik yang berlangsung kurang lebih tujuh tahun (1977-1984). (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 21).

Semenjak tahun 1984 terjadi perubahan situasi politik yang sangat cepat di Jammu dan Kashmir. Memburuknya situasi politik berawal dari alih kepemimpinan yang berlangsung di Kashmir. Menyadari kesehatannya yang semakin memburuk, pada tahun 1982 Sheikh Abdullah melakukan transfer kekuasaan tanpa melalui proses yang demokratis. Sheikh Abdullah menyerahkan kekuasaan kepada putranya sendiri, yaitu Farooq Abdullah. Farooq tidak mewarisi bakat kepemimpinan dan kemampuan manajerial seperti yang ditunjukkan ayahnya. Dibawah pemerintahannya korupsi meningkat dengan drastis. Aliansi politik untuk menjalankan pemerintahan tidak pernah bertahan lama. Kepemimpinannya juga mengalami pasang surut dengan cepat. Dalam hitungan bulan saja kekuasaannya digantikan pemerintahan pusat dan beberapa bulan kemudian dapat dipulihkan lagi. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 22-23).

Pada Juli 1984 atas desakan pemerintah pusat di New Delhi menyusul memburuknya situasi politik dan kekalahan partai Kongres dalam pemilu lokal, Farooq Abdullah dicopot dari kekuasaannya. Tahun 1986, Jammu dan Kashmir dikenakan status *Governor's Rule* oleh pemerintah pusat selama beberapa bulan. Situasi politik yang tidak menentu membangkitkan kembali ketidakpuasan rakyat Kashmir. Puncak dari ketidakpuasan di bawah kekuasaan India ini adalah setelah hasil pemilu 1987 diumumkan. Pemilu negara bagian Jammu dan Kashmir yang dinilai banyak kalangan penuh kecurangan ini dimenangkan oleh koalisi Kongres AJKNC (*All Jammu and Kashmir National Conference*).

Ketegangan India dan Pakistan karena Kashmir kembali marak sejak berkobar gerakan militan muslim di Jammu-Kashmir. Kebangkitan kelompok militan ini dimulai tahun 1987, sewaktu diselenggarakan pemilu di wilayah berpemandangan elok itu. Pemerintah India memang menganggap Jammu-Kashmir sebagai salah satu negara bagian. Banyak yang menilai ada kecurangan dalam pemilu itu. Pemerintah New Delhi dituding sengaja memberi keuntungan pada Partai Hindu. Kalangan muslim kecewa dan marah. Lalu mulailah kaum muda mereka menjadi ekstrem. Sikap anti India berkobar lagi. Mereka bukan lagi hanya melancarkan demonstrasi di jalanan, aksi gerilya bersenjata pun dilakukan, dan korban pun berjatuhan. Selain kelompok Front Pembebasan Jammu-Kashmir, muncul puluhan kelompok militan serupa. Mereka gencar melancarkan aksi kerusuhan bersenjata. New Delhi menuduh Pakistan sengaja melatih para Kashmir militan dan mempersenjatainya. (Tempo, 22 Februari 1992).

Hasil pemilu tahun 1987 semakin membuat marah rakyat Kashmir karena dianggap curang dan hanya menguntungkan partai Hindu. Akibat kekecewaan ini, Partai Konferensi Nasional mengalami perpecahan. Sebagian kelompok moderat yang tadinya berada didalam Konferensi Nasional akhirnya menyeberang ke partai-partai radikal. Sementara beberapa elemen pemuda semakin bersimpati dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok separatis. Koalisi Kongres-Konferensi Nasional akhirnya juga bubar. Dengan bubarnya koalisi ini, partai kongres menjadi kekuatan politik dominan di Negara bagian Jammu dan Kashmir. Sementara itu partai Konferensi Nasional yang kehilangan legitimasi semakin tidak bisa berbuat apa-apa. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 34).

Semenjak tahun 1987 situasi ketidakpastian mulai menghinggapi Jammu dan Kashmir. Pada bulan Juli 1988, yang oleh media India dianggap sebagai awal kebangkitan kembali perlawanan di Jammu dan Kashmir, serangkaian demonstrasi anti pemerintah, pemogokan, dan serangan-serangan menggunakan kekerasan terhadap fasilitas pemerintah yang dipelopori rakyat di Kashmir Valley mulai memenuhi udara politik Kashmir. Insiden ini kemudian berkembang

menjadi konfrontasi politik yang besar dengan pemerintah pusat. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 23).

Sejak itu rakyat Kashmir cenderung mengadakan perlawanan terhadap pemerintah dan mengadakan perlawanan terhadap pemerintah dan mengadakan kampanye anti India. Mereka menuntut kemerdekaan yang sejak tahun 1972 dianggap mati. Perjuangan kemerdekaan telah melibatkan seluruh unsur masyarakat dari rakyat jelata, dokter, insinyur, ahli hukum, dosen, mahasiswa bahkan birokrat. Kebijakan sekulerisme dan sosialisme yang diterapkan dari pemerintahan Sheikh Abdullah sampai Farooq Abdullah tidak membawa kemajuan bagi rakyat Kashmir.

Sejak 1990 pergolakan di Kashmir penuh berlumuran darah dan diwarnai dengan taktik teror dari kedua pihak. Pemimpin tertinggi Front Pembebasan Jammu dan Kashmir, Amanullah Khan berada di bawah tahanan polisi India. Keinginan militan Kashmir untuk merdeka itu timbul juga karena sikap Pakistan yang tampaknya tidak tegas. Bahkan Jadi kekhawatiran terjadinya perang India-Pakistan, Karachi tidak tuntas dalam mendukung gerakan kemerdekaan Kashmir. Dalam dua perang memperebutkan Kashmir, tentara Pakistan dibikin babak belur. Lebih parah lagi, Front Pembebasan hanyalah salah satu dari sekian banyak faksi yang berjuang untuk kemerdekaan, walaupun ia yang terbesar. Masih ada lagi kelompok yang lebih kecil, dan kelompok pro Pakistan. Yang terakhir ini terhimpun di bawah organisasi yang bernama Hizbul Mujahedeem dan Kekuatan Janbaaz Muslim. Tapi, simpati rakyat makin lama makin pada kelompok Amanullah Khan, yang tadinya minoritas. (Tempo, 11 April 1992).

Perlawanan rakyat Kashmir tahun 1990 memiliki karakter berbeda dibanding perlawanan pada periode 1947-1954 dan 1954-1977. Perbedaannya antara lain sebagai berikut :

Pertama, perlawanan era 1990-an lebih terorganisasi dan lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok perlawanan. Apabila pada dua periode konflik sebelumnya, perlawanan cenderung bersifat spontan, sporadik, dan hanya terorganisasi dalam satu dua kelompok, perlawanan tahun 1990-an diorganisasi dengan rapi dan kelompok yang terlibat lebih banyak. Kedua, perlawanan era

1990-an melibatkan anggota masyarakat yang jauh lebih terdidik dibanding pada periode-periode konflik sebelumnya. Pada dua konflik sebelumnya kelompok yang terlibat lebih banyak berasal dari masyarakat kelas bawah. Perlawanan tahun 1990-an melibatkan kelas menengah dan kelas atas yang selain punya kekuatan ekonomi, lebih terdidik, juga lebih memiliki kesadaran politik. Ketiga, perlawanan era 1990-an lebih banyak melibatkan generasi muda. Para pemuda ini sebagian besar dilahirkan pada paruh akhir periode konflik yang kedua dan ikut mengalami langsung dampak dari perubahan politik besar-besaran yang terjadi sejak 1983. Pengalaman ini membuat sifat perlawanan 1990-an cenderung lebih militan dibanding sebelumnya. Keempat, gerakan perlawanan tahun 1990-an memiliki sasaran yang lebih luas dengan metode perjuangan yang lebih keras. Apabila pada dua periode konflik sebelumnya gerakan banyak demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, sabotase dan aksi-aksi teror lainnya tidak adanya fasilitas pemerintah dan militer, perlawanan pada tahun 1990 sasarannya mencakup fasilitas sipil dan warga non-muslim. Di samping penggunaan kekerasan menjadi bentuk perlawanan yang dominan. Kelima, ciri khas yang paling membedakan perlawanan 1990-an dengan dua periode sebelumnya adalah menggemanya tuntutan kemerdekaan memisahkan diri dengan India. Meskipun pengaruh Pakistan terhadap sebagian besar pejuang masih besar, tema perjuangan tahun 1990-an bukan lagi sekedar plebisit untuk akses dengan Pakistan. Para pejuang Kashmir menginginkan Kashmir yang merdeka. Ciri yang terakhir ini menjadikan gerakan perlawanan di Kashmir bercorak etnik. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 24-25)

Pada masa generasi Sheikh Abdullah, corak perjuangan di Jammu dan Kashmir cenderung elitis. Keterbelakangan sebagian besar masyarakat membuat aktivitas politik sehari-hari hanya dijalankan oleh para elit. Sedangkan pada generasi tahun 1980-an berbeda dengan generasi Sheikh Abdullah. Menginjak dekade 1980-an jumlah masyarakat yang melek huruf dan memperoleh pendidikan di Jammu dan Kashmir meningkat tajam. Peningkatan ini mendorong masyarakat semakin kritis. Masyarakat juga semakin sadar bahwa persoalan-persoalan politik memerlukan keterlibatan mereka secara aktif. Politik tidak bisa

dibiarkan berlangsung begitu saja seperti diwaktu-waktu lampau, yaitu hanya dikelola dan di monopoli elit.

Meningkatnya secara tajam jumlah masyarakat terdidik dan melek huruf di Jammu dan Kashmir mendorong naiknya jumlah masyarakat terdidik dan melek huruf di Jammu dan Kashmir mendorong naiknya jumlah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam politik. Sayangnya peningkatan ini tidak diikuti dengan pelebagaan politik yang baik. Yang timbul malah kegagalan institusi-institusi Politik India untuk menyerap aspirasi dan partisipasi politik, yang akhirnya semakin memperteguh keyakinan rakyat Kashmir bahwa kemerdekaan merupakan jalan terbaik untuk memepertahankan identitas dan mengubah nasib mereka. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 31).

### **3. Tujuan Perjuangan Nasionalisme Kashmir**

Di Kashmir tujuan perjuangan organisasi yang terlibat terpecah dan beragam. Dalam garis besarnya tujuan mereka terbagi dua, kelompok yang menginginkan kemerdekaan penuh (*pro-azadi*) dan kelompok yang menginginkan akses dengan Pakistan (*pro-Pakistan*). Kelompok *Pro-Azadi* adalah JKLF. Kelompok *Pro-Pakistan* adalah Hizb-ul Mujahideen, Al Jihad, Al Barg, Ikhwan ul-Musalmeen, dan Al Umar Mujahideen. Kelompok yang menginginkan kemerdekaan terbagi dua lagi, yaitu yang menginginkan Kashmir merdeka atas dasar nasionalisme sekuler seperti JKLF dan yang menginginkan atas dasar Islam seperti *The People League*. Masing-masing kelompok memiliki afiliasi yang berbeda-beda. Kelompok yang menghendaki akses dengan Pakistan umumnya memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok perlawanan di Azab Kashmir dan *Northern Territories*. Demikian juga dengan kelompok-kelompok yang menginginkan Kashmir merdeka atas dasar Islam. Sementara itu kelompok *Pro-Azadi* lebih mengandalkan dukungan dari para perantau Kashmir yang telah sukses di negara-negara Eropa (terutama Inggris) dan Amerika Serikat. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 55).

Dilihat dari segi pengikut, kapabilitas yang dimiliki, dan frekuensi atau skala kegiatan, organisasi yang paling penting dari sekian banyak kelompok

perlawanan di Jammu dan Kashmir adalah *Jammu and Kashmir Liberation Front* (JKLF) dan Hizbul Mujahideen. JKLF memiliki tujuan perjuangan memerdekakan Kashmir atas dasar nasionalisme Kashmir. Kelompok ini hampir seluruhnya terdiri dari unsur Islam moderat di Jammu dan Kashmir. JKLF dipimpin oleh Aminullah Khan. Organisasi ini memiliki jaringan diberbagai kota di Pakistan seperti Rawalpindi, Karachi, Muzafarabad, dan kota-kota besar dunia seperti Birmingham dan London. JKLF mengandalkan jaringannya yang luas ini untuk memperoleh dana bagi perjuangan kemerdekaan Kashmir. Sponsor dana bagi JKLF terutama adalah warga Kashmir yang sukses di perantauan.

JKLF (Front pembebasan Jammu Kashmir) ini muncul pada tahun 1965 yang berjuang bagi kemerdekaan Kashmir. JKLF menjadi kekuatan penting yang selalu merepotkan pemerintah India. Hizbul Mujahideen Jammu Kashmir (HJMK) muncul pada tahun 1989. (Dhurorudhin Mashad, 1999 : 106).

HJMK memiliki tujuan yang berbeda dengan JKLF. HJMK menginginkan akses dengan Pakistan, sehingga dukungan utama organisasi ini datang dari Pakistan (terutama partai Jama'at-i-Islam). Dibanding JKLF, HJMK lebih terlatih, memiliki dana yang lebih besar, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih baik sehingga lebih efektif untuk melakukan aksi-aksi politiknya sekaligus ditakuti. Diantara dua organisasi besar ini terdapat kelompok-kelompok kecil yang bersifat oportunistis. Dikatakan oportunistis karena orientasi mereka tidak jelas apakah kepada Islam (HJMK) atau Kashmir (JKLF). Orientasi mereka sangat tergantung pada kepentingan jangka pendek. Untuk menyelaraskan perjuangan, organisasi-organisasi perlawanan di Jammu dan Kashmir membentuk suatu organisasi bersama yang berjuang secara resmi. Organisasi yang pertama bernama *Muslim United Front*, dibentuk pertengahan dekade 1980-an. Organisasi ini kemudian diganti dengan *Tehreek Hurriyet-e-Kashmir* (THK) atau *Kashmir Liberation Movement*. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 56).

Kashmir mendapatkan dukungan internasional dalam dua bentuk. Pertama berbentuk dukungan langsung yang diwujudkan dalam simpati ataupun bantuan material. Kedua berupa dukungan tidak langsung. Dalam bentuknya yang kedua ini, tindakan yang dilakukan negara, kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga

lainnya di luar Kashmir sebenarnya tidak ditujukan langsung kepada Kashmir. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menekan negara-negara yang terlibat dalam kasus Kashmir terutama India, namun karena efeknya menguntungkan pejuang Kashmir tindakan tersebut dipersepsikan sebagai dukungan.

Bentuk dukungan langsung adalah dukungan yang didapatkan pejuang Kashmir terutama berasal dari pemerintah dan rakyat Pakistan, yang menjadi sekutu utama mereka sejak kegagalan partisi 1947. Meski sering disangkal oleh pemerintah di Karachi, Pakistan dalam kenyatannya sangat aktif mendukung perjuangan Kashmir. Selain memberi bantuan finansial, militer dan intelijen ISI (*Inter-Services Intelligence Directorate*) Pakistan mendukung perlawanan pejuang Kashmir melalui bantuan persenjataan dan fasilitas pelatihan yang mereka sediakan. Meskipun bantuan finansial dan persenjataan dari Pakistan menurun, dukungan Pakistan tetap berlanjut, terutama kepada kelompok pejuang Kashmir yang pro-Pakistan seperti, Hizbul Mujahideen dan Muslim Janbaz. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 62-63).

Dukungan berikutnya datang dari kelompok-kelompok masyarakat Kashmir yang terdiaspora di negara lain, seperti di Pakistan dan di negara-negara Barat. Di Pakistan, penduduk keturunan Kashmir terkonsentrasi di dua wilayah yaitu di Azab Kashmir dan dikota-kota besar seperti Karachi. Warga Kashmir yang berada di Azab Kashmir mewujudkan dukungannya kepada perjuangan Kashmir dengan menjadikan wilayah-wilayah mereka sebagai tempat latihan dan jalur distribusi kebutuhan perjuangan ke wilayah Jammu dan Kashmir. Sementara itu, penduduk Kashmir yang berada di kota-kota besar Pakistan, walau jumlahnya relatif sedikit aktif memberikan dukungan finansial.

Penduduk Kashmir yang terdiaspora di negara-negara Barat mendukung perjuangan Kashmir lewat berbagai cara. Selain secara aktif memberi bantuan finansial, mereka juga menempuh langkah-langkah strategis yang menguntungkan perjuangan Kashmir. Dukungan tidak langsung kepada perjuangan Kashmir bersumber dari investigasi dan laporan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan India terhadap penduduk Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 64).

#### **D. Hasil Perjuangan Nasionalisme Kashmir Setelah Kemerdekaan India Sampai Tahun 1990**

Memasuki tahun 1990 situasi politik di Kashmir semakin memanas. Pada bulan Januari 1990, tuntutan memisahkan diri dari India kembali menggema di Jammu dan Kashmir setelah Farooq diturunkan dari kekuasaan dan setelah pemerintah pusat New Delhi menetapkan *Governor's Rule* atas Jammu dan Kashmir menyusul pecahnya pertikaian berdarah antara pasukan India dengan kelompok-kelompok militan yang mengakibatkan kerusuhan pecah dan menyebar ke seluruh Jammu dan Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 24).

Sebelum semangat bergabung dengan Pakistan oleh para militan Kashmir menjadi redup, dulu ciri utama perjuangan kemerdekaan rakyat Kashmir yang sebagian besar beragama Islam itu memang menjadikan Kashmir bagian dari Republik Pakistan, tetapi dengan belajar dari ketidakstabilan Pakistan sejak di bawah rezim Zia ul Haq dengan republik Islamnya, para pejuang Kashmir banting setir. Mendirikan negara sendiri yang bebas, merdeka, dan berdaulat menjadi impian mereka. Pada mulanya taktik gerilya yang diterapkan front Pembebasan sangat tak menyenangkan rakyat Kashmir. Karena pemerintah India sering mengadakan pembalasan yang lebih banyak meminta korban orang sipil, tetapi karena para penguasa Kashmir sering mengandalkan pasukan paramiliter yang sering berbuat kejam terhadap penduduk sipil, sikap rakyat berbalik. Wanita dan anak-anak pun turut meneriakkan slogan *Hame chahiye, azaadi* (Kami ingin kemerdekaan). (Tempo, 11 April 1992).

Meski sejak kemerdekaan India, hingga tahun 1981 tingkat kemakmuran penduduk Jammu dan Kashmir berada dibawah rata-rata India, namun dari tahun ke tahun tingkat kemakmuran penduduknya mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Indikator yang bisa digunakan untuk menunjukkan perkembangan positif ini adalah perkembangan produk domestik netto perkapita (PDNP) dan data presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di Jammu dan Kashmir. (Edwin Martua Bangun Tambunan, 2004 : 38).

Data PDNP hingga tahun 1975 menunjukkan meskipun dalam situasi pergolakan politik, rakyat Kashmir tetap dapat menikmati peningkatan

pendapatan perkapita. Naiknya tingkat pendapatan memang begitu mengesankan, akan tetapi bila data ini dikaitkan dengan struktur ekonomi Jammu dan Kashmir yang berbasis pertanian, peningkatan yang terjadi adalah sebuah prestasi. Dengan hanya mengandalkan pertanian, pendapatan perkapita Jammu dan Kashmir bisa naik sebesar Rs 538, dari Rs 287 tahun 1960 menjadi Rs 825 tahun 1975.

Berikut ini adalah tabel perbandingan PDNP dan data presentase jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di Jammu dan Kashmir untuk daerah pedesaan dan perkotaan di India tahun 1977-1978 :

**Tabel 1**

PERSENTASE POPULASI DI BAWAH GARIS KEMISKINAN  
UNTUK DAERAH PEDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI INDIA TAHUN 1977-1978

No	Negara Bagian/Union Territories	Pedesaan	Perkotaan	Gabungan
1	Andra Pradesh	43,89	35,68	42,18
2	Assam	52,65	37,37	51,10
3	Bihar	58,91	46,07	57,49
4	Gujarat	43,20	29,02	39,04
5	Haryana	23,25	31,74	24,84
6	Himachal Pradesh	28,12	16,56	27,23
7	<b><i>Jammu dan Kashmir</i></b>	<b>32,75</b>	<b>39,33</b>	<b>34,06</b>
8	Karnataka	49,88	43,97	48,34
9	Kerala	46,00	51,44	46,95
10	Madhya Pradesh	59,82	48,09	57,73
11	Maharstra	55,85	31,62	47,71
12	Manipur	30,34	25,48	29,71
13	Meghalaya	53,87	18,16	48,03
14	Nagaland	N.A	4,11	4,11
15	Orissa	68,97	42,19	66,40
16	Punjab	11,87	24,66	15,13
17	Rajashtan	33,75	33,80	33,76

18	Tamil Nadu	55,68	44,79	52,12
19	Tripura	64,28	26,34	59,73
20	Uttar Pradesh	50,23	49,24	50,09
21	West Begal	58,94	34,71	52,54
22	Union Teritories (seluruhnya)	34,32	17,96	21,69
Seluruh India (dibobotkan)		50,82	38,19	48,13

Sumber : Mahesh Chand dan Vinay Kumar Puri 1983. *Regional Planning in India*. New Delhi : Allied Publishers Private, yang dikutip Edwin Martua Tambunan Bangun, 2004 : 40-41.

Data tahun 1977-1978 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Jammu dan Kashmir hanya sebesar 34,06 % dari total populasi Jammu dan Kashmir. Angka ini jauh dibawah rata-rata India sebesar 48,13 % dan negara-negara bagian lain yang dikategorikan paling berhasil dalam pembangunan.

Melihat rendahnya pendapatan perkapita rakyat Jammu dan Kashmir, para politisi dan kelompok perlawanan seringkali mengkambinghitamkan minimnya perhatian pusat terhadap Jammu dan Kashmir. Ungkapan yang sering dikemukakan adalah pusat lebih member perhatian kepada Negara-negara bagian yang mayoritas Hindhu. Negara bagian yang mayoritas non-Hindu seperti Jammu dan Kashmir cenderung diabaikan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan pendapatan perkapita rakyat Jammu dan Kashmir dengan negara-negara bagian India :

**Tabel 2**

HIBAH PERKAPITA UNTUK NEGARA-NEGARA BAGIAN INDIA 1960-1961 DAN 1969-1970

No	Negara Bagian/Union Territories	1960-1961	1969-1970
1	Andra Pradesh	2,63	7,50
2	Assam	5,00	19,94
3	Bihar	3,42	5,70
4	Gujarat	2,36	10,34

5	Haryana	-	8,59
6	Himachal Pradesh	15,93	63,24
7	<b>Jammu dan Kashmir</b>	<b>3,23</b>	<b>6,16</b>
8	Karnataka	3,46	7,56
9	Kerala	3,23	6,16
10	Madhya Pradesh	3,46	7,56
11	Maharashtra	2,55	5,17
12	Mysore	3,68	4,67
14	Nagaland	-	519,13
15	Orissa	4,26	8,20
16	Punjab	3,45	7,91
17	Rajasthan	3,27	17,55
18	Tamil Nadu	4,10	7,04
19	Uttar Pradesh	2,90	6,31
20	West Bengal	2,13	5,33

Sumber : Mahesh Chand dan Vinay Kumar Puri 1983. *Regional Planning in India*. New Delhi : Allied Publishers Private, yang dikutip Edwin Martua Tambunan Bangun, 2004 : 41-42

Data hibah pusat terhadap Negara bagian untuk tahun 1960-1961 dan 1969-1970 adalah angka-angka-angka yang ada menunjukkan pusat menaruh perhatian yang lebih besar terhadap Jammu dan Kashmir dibanding negara-negara bagian lainnya. Untuk tahun 1960-1961, hibah perkapita Jammu dan Kashmir sebesar Rs 15,93. Sementara negara-negara bagian lainnya bergerak antara Rs 2,13 hingga Rs 5,00. Pada tahun 1969-1970, nilai hibah perkapita naik drastis. Apabila negara bagian lainnya hanya menikmati nilai hibah perkapita antara Rs 5,17 hingga Rs 19,94 (kecuali Nagaland Rs 519,13), Jammu dan Kashmir memperoleh Rs 63,24.

Data hasil sensus tahun 1971 dan 1981 menunjukkan lebih dari 55% penduduk Jammu dan Kashmir memiliki mata pencaharian sebagai petani. Kategori petani disini adalah penduduk yang penghasilannya diperoleh dari kegiatan bertani yang dilakukan di lahan milik sendiri. Bisa disimpulkan bahwa

pada tahun 1981 lebih dari separuh penduduk Jammu dan Kashmir sudah memiliki lahan sendiri.

**Tabel 3**

PERSENTASE PENDUDUK JAMMU DAN KASHMIR MENURUT JENIS  
MATA PENCAHARIAN

Mata Pencaharian	1971	1981
Petani	64,78	56,85
Buruh Tani	3,05	3,49
Industri Rumah Tangga	4,03	5,30
Pekerjaan lain	28,14	34,36

Sumber : Diolah dari “Tabel 15. *Percentage Distribution of Total Main Workers by States and Union Territories, 1971-1981*” dalam V.S. Verma 1988. *Census of India 198 : A Handbook of Population Statistic*. New Delhi: Indian Administrative Services, yang dikutip Edwin Martua Tambunan Bangun, 2004 : 43.

Kepemilikan lahan dan properti sebenarnya sudah diakomodir dalam konstitusi 1950. Pasal 370 Konstitusi 1950 tentang otonomi khusus Jammu dan Kashmir dan mengatur pemilikan lahan dan properti. Dalam garis besarnya disebutkan bahwa pemilikan lahan dan properti di wilayah Jammu dan Kashmir hanya diperkenankan untuk penduduk Jammu dan Kashmir. Transfer kepemilikan Hanya diperkenankan berlangsung antara sesama penduduk Jammu dan Kashmir.

Pasal 370 tidak membedakan penduduk Jammu dan Kashmir atas Muslim dan non-muslim. Inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menolak program landform yang dicanangkan Sheikh Abdullah tahun 1952. Melalui landform Abdullah mencoba menyeimbangkan distribusi lahan yang dimiliki penduduk non-muslim dengan penduduk muslim.

Pemerintah federal mempunyai argumentasi yang berbeda dengan Abdullah. Pemerintah pusat berpendapat pasal 370 bersifat non diskriminatif. Di samping itu pasal 370 tidak mengatur berapa luas lahan maksimal yang boleh dimiliki seseorang. Konsekuensinya adalah penduduk non muslim tetap memiliki hak untuk mempertahankan yang mereka miliki.

Meskipun sampai pada tahun 1990 perjuangan nasionalisme etnik Kashmir untuk menjadi negara merdeka yang seutuhnya belum bisa terwujud, akan tetapi dari tahun ketahun tingkat kemakmuran penduduknya mengalami peningkatan walaupun masih dibawah rata-rata India. Peningkatan ini menandai adanya kemajuan penduduk Kashmir. Misalnya berkurangnya masyarakat Kashmir yang buta huruf, sehingga mendorong naiknya jumlah masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu semangat nasionalisme etnik Kashmir untuk merdeka semakin gencar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sejak kemerdekaan India dan Pakistan pada tahun 1947 Maha Raja Kashmir Hari Singh menghadapi dilema apakah bergabung dengan India atau Pakistan. Sejak awal rakyat Kashmir berkehendak ikut ke dalam Pakistan, karena secara historis, emosional, dan kultural memang lebih dekat ke Pakistan yang sama agama, tetapi penguasanya Maha Raja Hari Singh bersikap ragu-ragu sehingga menimbulkan kemarahan rakyat Kashmir. Pada Agustus-September 1947 muncul gelombang protes rakyat Kashmir yang dibantu Pakistan. Hari Singh merasa ketakutan sehingga meminta bantuan New Delhi. PM Jawarlal Nehru bersedia membantu dengan syarat ada jaminan wilayah Kashmir bergabung ke India. Penggabungan Kashmir ke India semakin membuat kemarahan rakyat Kashmir. Pertikaian India-Pakistan soal Kashmir semakin panas dan tidak menemukan penyelesaian yang tepat.
2. Munculnya gerakan nasionalisme etnik Kashmir dilatarbelakangi oleh keinginan Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang merdeka. Intervensi India terhadap Kashmir dipersepsikan sebagai bentuk penjajahan setelah tidak dipenuhinya janji pemerintahan di New Delhi pada awal kemerdekaan untuk memberi otonomi penuh pada Jammu dan Kashmir. Meski diberi kesempatan untuk menyusun pemerintahan sendiri yang berasal dari warga Kashmir, dalam prakteknya Jammu dan Kashmir tidak pernah lepas dari campur tangan pusat dan tidak pernah menikmati kebebasan dalam menjalankan kekuasaan. Pengalaman pahit sebagai bangsa terjajah menyebabkan penduduk muslim Jammu dan Kashmir meyakini mereka punya agenda politik yang berbeda dengan komunitas-komunitas (termasuk komunitas muslim) lainnya di India. Pengalamam sebagai bangsa terjajah menumbuhkan kesadaran bagi penduduk muslim Jammu dan Kashmir bahwa kemerdekaan merupakan solusi yang terbaik.

*commit to user*

3. Di Kashmir organisasi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan terpecah dan beragam. Dari segi tujuan, gerakan-gerakan perlawanan di Jammu dan Kashmir terbagi dua, yaitu : (1) pro-Azadi, yang menginginkan kemerdekaan penuh, dan (2) pro-Pakistan, kelompok yang menginginkan akses dengan Pakistan. Kelompok Pro-Azadi adalah JKLF. Kelompok Pro-Pakistan adalah Hizb-ul Mujahideen, Al Jihad, Al Barg, Ikhwan ul-Musalmeen, dan Al Umar Mujahideen. Kelompok yang menginginkan kemerdekaan terbagi dua lagi, yaitu yang menginginkan Kashmir merdeka atas dasar nasionalisme sekuler seperti JKLF dan yang menginginkan atas dasar Islam seperti *The People League*. Masing-masing kelompok memiliki afiliasi yang berbeda-beda. Kelompok yang menghendaki akses dengan Pakistan umumnya memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok perlawanan di Azab Kashmir dan *Northern Territories*. Demikian juga dengan kelompok-kelompok yang menginginkan Kashmir merdeka atas dasar Islam. Sementara itu kelompok Pro-Azadi lebih mengandalkan dukungan dari para perantau Kashmir yang telah sukses di negara-negara Eropa (terutama Inggris) dan Amerika Serikat.
4. Hasil perjuangan nasionalisme etnik Kashmir untuk bisa menjadi negara merdeka dan menentukan nasibnya sendiri sampai tahun 1990 belum terwujud. Memasuki tahun 1990 situasi politik di Kashmir semakin memanas. Pada bulan Januari 1990, tuntutan memisahkan diri dari India kembali menggema di Jammu dan Kashmir setelah Farooq diturunkan dari kekuasaan dan setelah pemerintah pusat New Delhi menetapkan *Governor's Rule* atas Jammu dan Kashmir menyusul pecahnya pertikaian berdarah antara pasukan India dengan kelompok-kelompok militan yang mengakibatkan kerusuhan pecah dan menyebar ke seluruh Jammu dan Kashmir.

## B. Implikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, muncul implikasi yang dapat dipandang dari berbagai segi :

### 1. Teoritis

Kebangkitan nasionalisme etnik Kashmir muncul, karena keyakinan rakyat Kashmir yang diwariskan secara turun temurun bahwa mereka memiliki identitas yang berbeda dengan kelompok-kelompok etnik lain di India. Perjuangan nasionalisme etnik Kashmir untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1931, tetapi campur tangan India dan Pakistan terhadap Kashmir menyebabkan penderitaan rakyat Kashmir yang berkepanjangan dan menjadikan penghalang rakyat Kashmir untuk mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya. Pengalaman pahit sebagai bangsa terjajah menumbuhkan kesadaran bagi rakyat Kashmir untuk bisa mencapai kemerdekaan, akan tetapi sampai tahun 1990 perjuangan nasionalisme etnik Kashmir untuk mencapai kemerdekaan masih belum terwujud. Hingga saat ini Kashmir belum memperoleh kemerdekaan, karena baik India maupun Pakistan sama-sama mempertahankan kepentingannya di Kashmir. Bahkan konflik kedua negara tersebut telah menjalar di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak negara yang berjuang untuk menyelesaikan masalah Kashmir, tetapi tidak pernah menemukan titik temu penyelesaian masalah Kashmir yang tepat.

### 2. Praktis

Konflik antara India dan Pakistan yang terjadi karena perebutan wilayah Kashmir mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk Kashmir. Apabila antara India dan Pakistan mau memberikan kemerdekaan Kashmir secara penuh dan tidak saling mencampuri, dimungkinkan pertikaian kedua negara tersebut akan berakhir, serta Kashmir akan terbebas dari penderitaan yang mereka alami selama ini. Sehingga tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuh dan terciptanya perdamaian dunia.

Dalam penelitian ini telah memunculkan suatu nilai yang perlu diteladani yaitu nilai-nilai semangat juang yang tinggi dari rakyat Kashmir dalam

mempertahankan tanah air dan hak-haknya yang diperebutkan India dan Pakistan. Meskipun dalam perjuangannya selalu mengalami kegagalan tetapi semangat juang bangsa Kashmir tidak pernah padam. Oleh karena itu implikasi praktis yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran seseorang mewarisi nilai-nilai semangat juang yang diperlihatkan bangsa Kashmir dalam mempertahankan tanah airnya tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan.

### 3. Metodologis

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi historis. Metodologi historis adalah metodologi yang berusaha untuk merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam hal ini peneliti berusaha merekonstruksi peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan nasionalisme etnik Kashmir setelah kemerdekaan India sampai tahun 1990. Dalam penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan dalam pemakaian sumber primer, karena sumber primer sulit ditemukan di perpustakaan-perpustakaan tempat peneliti melakukan penelitian. Dengan demikian belum bisa mendapatkan kajian secara mendalam tentang apa sebenarnya keinginan India, Pakistan dan rakyat Kashmir yang terpecah-pecah atas dasar kepentingan kelompok etnisnya.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Sejarah / P.IPS, FKIP, Universitas Sebelas Maret yang ingin mengadakan penelitian tentang “Nasionalisme Kashmir setelah kemerdekaan India”, skripsi ini bisa digunakan sebagai penelitian penunjang guna penelitian lebih lanjut dengan mencari sumber yang lebih banyak lagi.
2. Kepada pengelola perpustakaan Program Studi Sejarah, mohon referensi buku tentang sejarah Asia Selatan khususnya tentang Kashmir ditambah, karena sangat sulit mencari sumber tentang Kashmir.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Agung S, leo.2002. *Sejarah Intelektual*. Salatiga : Widya sari Press.
- Badri Yatim. 1999. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Cahyo Budi Utomo, 1995. *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. IKIP Semarang Press.
- Dwijo Atmoko, J.B. 2006. *Nasionalisme Di Berbagai Negara*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Duverger, Maurice. 2003. *Sosiologi Politik*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Dudung Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dhurorudin Mashad. 2006. *Muslim Di India*. Jakarta: Grafika Indah.
- . 1999. *Agama Dalam Kemelut Politik Dilema Sekularisme Di India*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Diamond Larry. 1998. *Nasionalisme, Konflik, Etnik, Dan Demokrasi*. Bandung: ITB.
- Edwin Martua Bangun Tambunan. 2004. *Nasionalisme Ethnik Kashmir dan Quebec*. Semarang Timur. Intra Pustaka Utama.
- Esposito, J.L. 1985. *Islam Dan Perubahan Sosial-Politik Di Negara Sedang Berkembang*. Yogyakarta: PLP2M.
- Gottchalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Indonesia University Press.
- Helius Sjamsudin. 1996. *Metodologi Sejarah*, Jakarta: Depdikbud.
- Iswara, F.1982. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Offset Angkasa.
- Isnaini. 2000. *Pengantar Ilmu Sejarah (India)*. Surakarta: UNS.
- Kartini Kartono. 1990. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju.

*commit to user*

- Kahin, George, MC Turnan. *Major Governments Of Asia*. 1974. United Kingdom: Cornell University Press.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogyakarta.
- Moh. Nazir, 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Morgenthau, Hans J. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, TSG. 1959. *India Sedjarah Politik dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihomping, ODP. 1962. *India, Sedjarah Dan Kebudayaan*. Bandung: Sumur Bandung.
- Suhartoyo Hardjosatoto. 1985. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia : Suatu Analisis Ilmiah*. Yogyakarta : Liberty.
- Sartono Kartodirjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Sukarno. 1984. *Ilmu dan Perjuangan*. Jakarta: Idayu.
- Sukarna. 1981. *Ideologi: Suatu studi ilmu politik*. Bandung: Alumni.
- Sidi Gazalba. 1996. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta : Bathara Karya Aksara
- Tuti Nuriah. 1990. *Asia Selatan Dalam Sejarah*. Jakarta: UI.
- Taufik Abdullah. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Retorika.
- Weber Max. 1985. *Konsep-konsep Dasar Dalam Sosiologi*. Jakarta. Rajawali Pers.

## B. Majalah dan Surat Kabar

Tempo, 05 Mei 1990, “*Nyala jihad di azad kashmir*” .

Tempo, 22 Februari 1992, “*Duri dalam daging*” .

Tempo, 11 April 1992, “*Dua musuh kashmir*” .

Deseret News 2 September tahun 1965 “*Pakistanis Push Kashmir Battle*”.

Deseret News Wednesday 22 September tahun 1965 “*Kashmir Cease-Fire*”.

## C. Internet

Konflik Kashmir:

<http://badielyk.blogspot.Com/2010/03/latar-belakang-konflik-kashmir.html>

Dhurorudin Mashad:

<http://catalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/2422421.pdf>

Zahir Khan:

<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=23032>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kashmir>

[http://www.arahmah.Com/index\\_php/blog/read/1655/kashmir-bumi-jihad-yang-terlupakan](http://www.arahmah.Com/index_php/blog/read/1655/kashmir-bumi-jihad-yang-terlupakan)

[http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story\\_id.html](http://didyouknow.org/indonesia/kisah/story_id.html)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_India-Pakistan\\_1965](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_India-Pakistan_1965),

<http://zonaislam.com/?p=92>,

[http://azizsutan.blogspot.com/2002/J6J1\\_archive.html](http://azizsutan.blogspot.com/2002/J6J1_archive.html),

[http://www.maxabout.com/politics/p\\_leaders/sheikh\\_mohammad-abdullah.aspx](http://www.maxabout.com/politics/p_leaders/sheikh_mohammad-abdullah.aspx)



Lampiran 1

**PETA LOKASI BENUA ASIA**



(Sumber: <http://su.wikipedia.org/wiki/Gambar:LocationAsia.png>)

Lampiran 2

**PETA BENUA ASIA**



(Sumber: <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Asia-map.png&filetimestamp=20100415033243>)

Lampiran 3

**PETA KAWASAN ASIA SELATAN**



[http://ms.wikipedia.org/wiki/Asia\\_Selatan](http://ms.wikipedia.org/wiki/Asia_Selatan)

## Lampiran 4

## PETA KASHMIR



Kashmir terbagi oleh tiga negara: Pakistan (berwarna hijau di peta), India (cokelat tua) dan China (Aksai Chin di bagian timur laut)  
(Sumber: <http://id.wikipedia.org/wiki/Kashmir>)

Lampiran 5



Sheikh Abdullah

Sumber:

(<http://www.google.co.id/imglanding?q=foto%20sheikh%20abdullah&imgurl=http://ikashmir.net/article370/images/abdullah.jpg&imgrefurl>)

*commit to user*

Lampiran 6



Pertemuan Sheikh Abdullah dengan Presiden [Ayub Khan](#) dan luar negeri kemudian menteri [ZA Bhutto](#) membicarakan tentang masalah Kashmir tahun 1964

Sumber:

([http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sheikh Abdullah with Ayub Khan and Z.A. Bhutto 1964.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sheikh_Abdullah_with_Ayub_Khan_and_Z.A._Bhutto_1964.jpg))

Lampiran 7:

INSTRUMENT OF ACCESSION OF JAMMU AND KASHMIR STATE

WHEREAS the Indian Independence Act, 1947, provides that as from the fifteenth day of August, 1947, there shall be set up an independent Dominion known as INDIA, and that the Government of India Act, 1935, shall, with such omissions, additions, adaptations and modifications as the Governor-General may by order specify be applicable to the Dominion of India;

AND WHEREAS the Government of India Act, 1935, as so adapted by the Governor-General provides that an Indian State may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof:

NOW THEREFORE

I, *Shri Maharaja Gajendra Pratap Singh* Ruler of JAMMU AND KASHMIR STATE in the exercise of my sovereignty in and over my said State do hereby execute this my Instrument of Accession and

*Shri Maharaja Gajendra Pratap Singh*  
*Shri Maharaja Gajendra Pratap Singh*  
*Tibet code*  
*Deshi Adhikari*

1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion Legislature, the Federal Court and any other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession, but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion, exercise in relation to the State of JAMMU AND KASHMIR (hereinafter referred to as "this State") such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India on the 15th day of August 1947 (which Act as so in force is hereinafter referred to as "the Act").

2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.

3. I accept the matters specified in the Schedule hereto as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.

4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of this State whereby any functions in relation to the administration in this State of any law of the Dominion Legislature shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.

5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act, 1947 unless such amendment is accepted by me by an Instrument supplementary to this Instrument.

6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for the purposes of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to acquire any land, I will at their request acquire the land at their expense or if the land belongs to me transfer it to them on such terms as may be agreed, or, in default of agreement, determined by an arbitrator to be appointed by the Chief Justice of India.

7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future constitution of India or to fetter my discretion to enter into arrangements with the Government of India under any such future constitution.

8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this State, or, save as provided by or under this Instrument, the exercise of any powers, authority and rights now enjoyed by me as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this State.

9. I hereby declare that I execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.

Given under my hand this 26<sup>th</sup> day of ~~August~~ OCTOBER Nineteen hundred and forty seven.

Hari Singh  
Maharaja of Jammu and Kashmir State  
ms

I do hereby accept this Instrument of Accession.

Dated this 26<sup>th</sup> day of ~~August~~ OCTOBER Nineteen hundred and forty seven.

Mountbatten  
(Governor-General of India)

The Instrumen aksesi ke Uni India ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1947. dengan tanda tangan dari Maharaja Hari Singh of Jammu dan Kashmir, dan Viscount Mountbatten Burma, Gubernur Jenderal India .  
(Sumber : <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kashmir-Accession-Document-b.jpg>)

Lampiran 8:

# TEMPO online

Tempo 05 Mei 1990

## **Nyala jihad di azad kashmir**

SAAT ini bukan waktu yang tepat bagi orang India untuk bepergian di Azad Kashmir -- wilayah Pakistan yang oleh India disebut "Kashmir yang diduduki Pakistan". Segala sesuatu yang berkaitan dengan India dapat menimbulkan hal yang mengerikan. Namun, Presiden Azad Kashmir, Sardar Abdul Qayyum, memberi kelonggaran. Ia meluluskan permintaan koresponden India Today, Kanwar Sandhu, dan fotografer Pramod Pushkarna, untuk berkunjung. Bahkan ia menyediakan seorang petugas yang akan mengawani wartawan itu keliling daerah yang -- dalam sudut pandang India -- disebut "Kashmir lain". Mereka bahkan mengunjungi tempat yang tak pernah terjamah oleh kaki India sejak tahun 1947 -- saat Pakistan memisahkan diri dari India. Semangat fundamentalisme menyergap mata, begitu masuk daerah Kohala. Ada tulisan berbahasa Inggris "Selamat datang di Azad Kashmir" terpampang besar. Yang lain adalah coretan hijau Islam dalam bahasa setempat yang menyatakan bahwa Kashmir bakal menjadi Pakistan. Menuju Muzaffarabad, ibu kota Azad Kashmir, coretan-coretan maupun poster makin menggebu-gebu. "Tiba saatnya memutus belenggu perbudakan dari Kashmir yang terdera." Muzaffarabad terletak empat jam perjalanan dari Islamabad. Di sanalah jalan lama Rawalpindi-Murree bercabang -- sewaktu India Pakistan belum pecah -- menuju Srinagar, sebuah kota yang dulu tenang, tempat para pegawai kecil menetap. Tapi sekarang kota ini menjadi pusat kancah kegiatan politik dan semangat fundamentalis bagi "kemerdekaan" Kashmir. Muzaffarabad juga sebuah markas besar. Di sanalah Kashmir Liberation Cell berpangkalan. Sebuah organisasi yang didirikan tahun 1987 untuk mewujudkan "penentuan nasib sendiri bagi bangsa Kashmir". Para pegawai organisasi ini digaji oleh pemerintah pusat (Pakistan), serta pemerintahan Azad Kashmir. Di Mirpur lebih edan. Setiap inci sekeliling Shaheedan Chowk -- pusat kegiatan politik dan agama -- dipenuhi oleh coretan dan poster anti-India. Sejumlah poster mengutuk Perjanjian Shimla. Sebuah kutipan ayat Quran, yang mendorong manusia untuk bangkit, terpampang pada spanduk besar. Kegairahan itu berbau propaganda. Setiap orang yang dijumpai kedua wartawan itu bicara tentang "ratusan pengungsi" yang mereka katakan baru menyeberang dari India pekan itu. Namun sewaktu ditanya lebih lanjut, jawabannya semakin meragukan. Akhirnya, kata "ratusan" itu berkurang menjadi sekitar 20 keluarga yang berada di Bagh -- salah satu distrik di sana. Suasana yang emosional terus mengalir menguasai hampir setiap aspek kehidupan di Azad Kashmir. Hingga saat ini sebenarnya film dan lagu India sangat populer di kawasan itu. Namun, nyala fundamentalisme, dan

menggalaknya seruan untuk "memerdekakan" Kashmir, membuat suasana berubah. Lirik lagu-lagu baru sudah berubah. Salah satu kaset paling terkenal di sana berjudul Kashmir Se Aati Hai Sada. Kaset ini dijual di mana-mana. Stanza pembukanya adalah: Allahuakbar/Marde Mujahid/Marde Khuda/Talwar Utha/Maidan me aa. (Allahuakbar/Wahai pejuang Islam/Wahai pejuang Tuhan/Cabut pedangmu/Majulah ke medan laga.) Di semua wilayah, di desa-desa, prosesi anti-India hampir menjadi upacara sehari-hari. Orang-orangan yang mereka sosokkan sebagai V.P. Singh (Perdana Menteri India) selalu dibakar atau dipukuli tongkat. Para pelajar yang membawa plakat dan spanduk besar menunggu di jalan-jalan, meminta sumbangan dari siapa pun yang lewat untuk "dana jihad" bagi kemerdekaan Kashmir. Seruan serupa menggema dari masjid-masjid. Setiap Jumat, setelah salat Jumat, ceramah pun diberikan lagi untuk menyeru ke jalan jihad. "Sekarang atau tidak sama sekali," teriak sang penceramah lewat pengeras suara. Di Azad Kashmir saat ini, menjadi seorang India sungguh merupakan kemalangan besar. Sebaliknya bagi orang Sikh. Mereka akan mendapat simpati karena juga sedang berjuang melawan pemerintahan New Delhi. Di sebuah pos pengawas, seorang polisi melambaikan tangan meminta Sandhgu mendekat. Ia bermaksud melihat dari dekat serban yang dipakai wartawan itu -- agar jelas dari kalangan mana. Bagi masyarakat Azad Kashmir, seorang muslim adalah sahabat seorang Hindu musuh sedang seorang Sikh diperlakukan di antaranya. Akibat pergolakan yang terjadi di Punjab beberapa tahun terakhir, kaum Sikh sering dianggap berada di pihak mereka. Sama-sama berjuang melawan India. Maka, di Azad Kashmir, salah satu pertanyaan yang lazim ditujukan pada seorang Sikh adalah, "Bagaimana gerakan Khalistan (kalangan Sikh yang menuntut kemerdekaan sendiri)-mu berlangsung?" Setelah itu akan disusul oleh sumpah serapah terhadap Hindu. Suasana yang kelewat emosional menjadikan masyarakat setempat begitu gampang menelan propaganda. Sejumlah orang yang ditemui wartawan itu mengisahkan beberapa kejadian. Menurut mereka, para Sikh di kesatuan tentara India menolak menembakkan peluru terhadap orang-orang Kashmir. Wartawan itu mencoba menjelaskan bahwa itu tak mungkin terjadi karena tentara India seluruhnya tak berpolitik. Namun, penduduk-penduduk memandang tak percaya dan setengah tak suka terhadap penjelasan itu. Tetapi menjadi seorang Sikh tak dengan sendirinya beruntung. Pada kenyataannya, semua orang India dapat menjadi sasaran. Terutama di Chakothi, sebuah kota kecil yang kini diperkuat dengan 4.000 tentara Pakistan. Dua bulan lalu, terjadi insiden ketika sekelompok orang mencoba melintasi "garis pengawasan pasukan PBB" untuk menyeberang ke India. Sebagian di antara mereka kontan dimangsa peluru tentara India dari seberang. Tiga orang tewas. Sejumlah yang lain luka-luka dan sekarang masih dirawat di rumah sakit militer setempat. Perasaan anti-India kini telah mencapai titik didih. Seorang polisi mengingatkan kemungkinan bahaya yang menghadang kedua wartawan itu. "Para remaja terus berkeliling membawa senapan kalashnikov. Sebagai seorang India engkau dapat mereka jadikan sebagai sasaran," katanya. Yang diperingatkan segera mengenakan topi menutupi serbannya, seolah ia dari kelompok wartawan Sri Lanka. Wartawan itu memang diizinkan leluasa bepergian. Namun, pemandunya sangat berhati-hati mengarahkan, menghindari

daerah-daerah militer yang sangat sensitif. Seluruh kegiatannya dimonitor dengan saksama -- entah untuk menjaga keamanan atau menghambat kegiatan mereka. Di Muzaffarabad, mereka menginap di guest house yang disediakan pemerintah. Bukan di hotel seperti yang telah mereka rencanakan. Sementara itu, para wartawan asing justru tak mendapat hambatan sama sekali. Tak banyak hotel yang memadai di Azad Kashmir. Salah satunya di Muzaffarabad adalah Hotel Al Abbas -- mungkin satu-satunya hotel yang dapat disebut lumayan. Pembangunan agaknya masih seret. Sebagian besar wilayah Azad Kashmir nampak sangat terbelakang dan primitif. Jalan utama yang dibangun lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan fasilitas militer. Di seantero desa dan kota-kota kecilnya tak ada yang menyejukkan mata. Tak seperti Jammu-Kashmir, turis bukan sumber utama pendapatan daerah Azad Kashmir. Hanya pemandangan di lembah Neelam yang dapat mereka klaim sebagai tempat yang menarik bagi wisatawan. Yang lebih mengherankan adalah tidak adanya surat kabar lokal. Kenyataannya, harian Urdu pertama, Azadi, baru dua minggu berselang terbit di Muzaffarabad. Dibandingkan dengan Jammu-Kashmir, Azad Kashmir hanyalah "sebuah pulau" yang sangat kekurangan sekalipun, dalam lima tahun terakhir, pembangunan setempat dicoba dipacu. Misalnya dengan adanya listrik masuk desa, serta pendirian SD-SD Inpres. Kayu adalah industri utama di kawasan ini. Sedangkan Muzaffarabad, secara tradisional telah terkenal sebagai pusat pembuatan mebel kayu Walnut. Namun, sekarang usaha itu dililit oleh persoalan pemasaran dan distribusi. Hanya Mirpur, kota dekat Bendungan Mangla, yang dapat dibilang berkembang sebagai kota kawasan industri. Di sana dekat dengan Grand Trunk Road. Para pengusaha pun mulai mendirikan pabrik-pabrik di kawasan itu. Distrik Muzaffarabad memang termasuk distrik yang paling terbelakang di seluruh anak benua, sebelum pemisahan India-Pakistan. Sedang iklim politiknya cenderung tinggi tak menentu. Sangat sedikit perkembangan ekonomi yang terlihat. Gedung untuk kantor perdana menteri juga baru belakangan ini dibangun. Sebelum semangat fundamentalisme marak, pandangan warga setempat pun tidak banyak tertuju pada ekonomi. Dalam istilah Dr. Khan Zaman Mirza -- Direktur Sekolah Studi Islam -- "manusia tak hanya hidup dengan roti saja". Orang-orang Kashmir di Azad Kashmir cenderung menginginkan agar seluruh Kashmir (termasuk Jammu-Kashmir di India) bergabung pada Pakistan. Seruan Amanullah Khan, pemimpin Jammu-Kashmir Liberation Front (JKLF) yang menginginkan kemerdekaan sendiri bagi Kashmir, kurang mendapat sambutan di sini. Namun, ada kata yang disepakati oleh semua pihak. Yakni Istissowab-e-Rai -- penentuan nasib sendiri. Seorang tokoh tua di Muzaffarabad, Sheikh Aqeel-ul-Rahman, dari Jamiat Tulba mengatakan, "Kami akan mempersembahkan setiap tetes darah kami untuk jihad, dan karena itulah kami menyiapkan orang-orang." Ia mengaku punya kamp latihan di perbukitan, tetapi ia menolak mengungkapkannya secara rinci. Tokoh macam dia selalu mengkritik Pemerintah Pakistan dan Pemerintah Azad Kashmir yang -- menurut dia -- membuang-buang uang untuk membangun jalan raya. Juga untuk kegiatan pembangunan yang lain. "Yang terpenting adalah bagaimana bisa sampai ke Srinagar," katanya tegas. Maksudnya, bertempur sampai merebut seluruh Kashmir India yang beribu kota di Srinagar. Jalan lama menuju Srinagar lewat Muzaffarabad terputus dua kilometer setelah Chakothi.

Dari sini Srinagar cuma 120 km. Dua pasukan bersiaga di setiap sisi yang dibatasi oleh jembatan yang melintas di atas Sungai Jheluum. Sungai ini meliuk di antara bukit-bukit, memisahkan kedua wilayah. Di sektor Tithwal Sungai Neelam -- tepatnya di Desa Chaliana -- terlihat pasukan India yang sedang piket di sebelah bawah. Mereka berjajar mendengarkan pengarahannya. Yang bertugas terus berkeliling membawa teropong. Sekali-sekali terdengar sedikit tembakan senapan. Tak cukup jelas siapa yang sesungguhnya berkuasa di Azad Kashmir. Presiden Azad Kashmir Sardar Qayyum, tentara, badan intelijen yang tak terlihat namun sangat kuat, ataukah Islamabad. Di tengah perjalanan, wartawan India itu dicegat oleh dua petugas yang memintanya untuk membuka gulungan film. Karena menolak, mereka disuruh meninggalkan Azad Kashmir sesegera mungkin oleh direktur Public Relations, Profesor M. Iqbal Mirza. Kedua wartawan itu mencoba mendebat dengan mengatakan bahwa mereka telah diizinkan oleh Sardar Qayyum. Namun, Mirza mengatakan bahwa presiden itu hanya seorang "simbol pimpinan". "Perintahku ini berasal dari yang paling berkuasa di tanah ini." Sewaktu Qayyum mendengar itu, ia marah lalu segera mengatur agar wartawan itu meneruskan reportasenya di Azad Kashmir. Akhirnya Inter Service Public Relation (ISPR) yang dikepalai oleh seorang brigadir jenderal memberikan persetujuan. Seorang kapten tentara lalu ditambahkan untuk memperkuat tim pemandu wartawan yang beranggotakan tiga orang itu. Panggung politik di Azad Kashmir pun tampak sangat membingungkan. Di sana partai-partai politik bercampur-baur dengan kelompok fundamentalis yang masing-masing bergerak sendiri-sendiri. Di Mirpur, massa anggota Federasi Pelajar Nasional tampak bergerombol mengadakan aksi menuntut "pembebasan" Kashmir. Di kawasan berpenduduk sekitar dua juta jiwa itu, paling sedikit terdapat 17 partai politik dan organisasi kaum muda yang masing-masing berbeda. Satu-satunya faktor yang mungkin merupakan pengikat hanyalah "pembebasan" Kashmir. Menurut Aziz-ur-Rahman, seorang anggota lembaga di Desa Chaliana, semua partai sesungguhnya hanya satu partai. Yakni partai Allah. "Politik yang diatasmakan partai-partai sekarang sudah berlalu," katanya. Meletupnya semangat jihad menjadikan para wanita Kashmir ikut tampil ke muka. Sepanjang perjalanan wartawan India itu, memang sangat sedikit wanita yang bersedia ditemui, diwawancara, apalagi untuk difoto. Namun, bagaimanapun, organisasi wanita sudah bangkit. Misalnya yang menyebut diri Dukhtran-e-Millat-e-Kashmir -- "Putri Bangsa Kashmir". Organisasi yang diketuai Rabia Gilani itu dibentuk di Muzaffarabad. Azad Kashmir punya lembaga semacam DPR hasil pemilu. Lembaga itulah yang mengesahkan segala undang-undang. Kecuali untuk urusan pajak yang ditetapkan oleh sebuah lembaga tersendiri yang diketuai oleh Perdana Menteri Pakistan. Seperti halnya di Jammu-Kashmir, kalau bukan orang Kashmir tak diperkenankan membeli tanah atau rumah di Azad Kashmir. Semua pegawai tingkat bawah dan menengah diisi oleh orang-orang Kashmir. Hanya tingkat pejabat saja yang Pakistan. Yang istimewa, bagaimanapun tingkatnya, apa pun jabatannya, orang Kashmir semua merupakan bagian dari apa yang disebut "pejuang kemerdekaan". Sebutlah misalnya nama Abdel Majeed Mallik. Sehari-hari ia adalah Ketua Pengadilan Tinggi Azad Kashmir. Tapi waktunya lebih banyak disita oleh pertemuan-pertemuan umum mengenai masalah Kashmir

daripada mengurus perkara. Agaknya, itu juga sekaligus menjadi salah satu kunci untuk dapat menjadi pejabat berarti. Setelah berkeliling selama 10 hari, wartawan India itu menyimpulkan bahwa Azad Kashmir seperti sedang bangun dari tidurnya yang 40 tahun. Sekarang semua penduduk adalah tentara yang siap diterjunkan pada perang suci untuk membebaskan Kashmir India.

Di antaranya banyak yang maju dengan bersenjatakan semangat keislaman. Sejumlah yang lain -- yang lebih berbahaya -- dengan kalashnikov. Ironisnya, tantangan yang mereka hadapi justru bukan dari Islamabad. Melainkan dari Srinagar dan New Delhi. ZUC

Sumber:

(<http://ip52214.cbn.net.id/id/arsip/1990/05/05/SEL/mbm.19900505.SEL16654.id.html>)



## Lampiran 9

# TEMPO online

22 Februari 1992

## **Duri dalam daging**

SEJARAH Kashmir adalah sejarah pertikaian. Pada separuh terakhir abad ini, soal Jammu-Kashmir (Azad Kashmir tak pernah jadi masalah) bagaikan bara yang kadang menyala, kadang mendingin. Persisnya, itu mulai berlangsung sejak 1947, saat kaum muslim India memisahkan diri dari saudara sebangsa yang beragama Hindu untuk membentuk negara Pakistan. Saat itulah Kashmir terbelah. Dan sejak saat itu pula Kashmir selalu menjadi penyulut pertikaian dua negara di anak benua Asia itu. Pakistan memperoleh sepertiga wilayah subur ini, yang kemudian dinamakan Azad Kashmir, Kashmir Merdeka. Tapi India menyebut kawasan itu sebagai "Kashmir yang diduduki Pakistan". Dua pertiga wilayah sisanya, yang kemudian disebut Jammu-Kashmir, dikuasai India. Penduduk kedua Kashmir sama-sama mayoritas Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi duri dalam daging bagi New Delhi. Penduduk muslim Jammu-Kashmir ingin bergabung dengan Pakistan, dan belakangan ingin memisahkan diri dan membentuk negara independen, bebas dari Pakistan maupun India. India sejak awal menolak keinginan itu. Maklumlah, selain subur, Jammu-Kashmir menjadi salah satu lumbung padi, dan letak Kashmir di sebuah celung itu dilihat dari sudut militer sangat strategis. Di Jammu-Kashmir, berpenduduk 8,5 juta jiwa, yang dikontrol India inilah selama ini sering terjadi bentrokan antara warga Kashmir dan tentara India. Salah satu sebabnya, mayoritas Kashmir Islam, sedangkan mayoritas India Hindu. Apalagi pihak India selalu menerapkan politik tangan besi dan gampang menggunakan kekerasan. Yang makin menjadikan bentrokan gampang terjadi, Pakistan selama ini sulit menahan diri untuk tidak melibatkan diri dalam urusan saudara seagama mereka di seberang perbatasan. Kashmir telah dua kali menyebabkan pecah perang India-Pakistan, yakni tahun 1965 dan 1971. Ketegangan India dan Pakistan karena Kashmir kembali marak sejak berkobar gerakan militan muslim di Jammu-Kashmir. Kebangkitan kelompok militan ini dimulai tahun 1987, sewaktu diselenggarakan pemilu di wilayah berpemandangan elok itu. Pemerintah India memang menganggap Jammu-Kashmir sebagai salah satu negara bagian. Banyak yang menilai ada kecurangan dalam pemilu itu. Pemerintah New Delhi dituding sengaja memberi keuntungan pada Partai Hindu. Kalangan muslim kecewa dan marah. Lalu mulailah kaum muda mereka menjadi ekstrem. Sikap anti-India berkobar lagi. Mereka bukan lagi hanya melancarkan demonstrasi di jalanan, aksi gerilya bersenjata pun dilakukan, dan korban pun berjatuhan. Selain kelompok Front Pembebasan Jammu-Kashmir, muncul puluhan kelompok militan serupa. Mereka gencar melancarkan aksi kerusuhan bersenjata. New Delhi menuduh Pakistan sengaja melatih para Kashmir militan dan

mempersenjatainya. Para militan dari Jammu-Kashmir yang dikejar dan dicari-cari pasukan India biasanya memang lari mendaki pegunungan bersalju, menyusup ke Pakistan. Islamabad tentu saja menampik tuduhan India. Pihak Pakistan kerap menyatakan tak sanggup menghentikan penyusupan militan muslim dari Jammu-Kashmir. Sejauh ini tuduhan India memang tak pernah terbukti. Selain bahwa Amanullah Khan, melancarkan perjuangannya dari Muzaffarabad, ibu kota Azad Kashmir. FS

Sumber:

(<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/02/22/LN/mbm.19920222.LN7413.id.html>)



Lampiran 10

# TEMPO online

11 April 1992

## Dua musuh kashmir

KASHMIR dengan alamnya yang indah adalah salah satu tujuan wisata terpenting di seluruh Asia Selatan. Tapi, itu dulu. Sekarang ia malahan dijauhi para turis. Sebabnya, polarisasi politik di sana makin kacau dan kekerasan makin merajalela. Dan sementara itu pengaruh India dan Pakistan, dua negara yang memperebutkan wilayah tersebut, makin luntur. Sedangkan perjuangan rakyat Kashmir sendiri makin terpecah. Javed Ahmed Mir, pemimpin kelompok militan, adalah salah satu contoh kompleksnya masalah Kashmir. Pemimpin satu dari sekian faksi yang menginginkan tanah sengketa itu merdeka pada Sabtu silam mengatakan, ia dan pengikutnya akan mengadakan longmarch menuju garis demarkasi yang membagi India dengan Pakistan. Rencananya, mereka akan bergabung dengan para rekan seperjuangan dari wilayah Pakistan yang juga merencanakan gerakan semacam. Kata Mir, yang menjadi komandan sayap militer Front Kemerdekaan Jammu dan Kashmir, iring-iringan itu bagian dari kampanye untuk menumpulkan pengaruh Pakistan atas Kashmir. "Karena Pakistan telah bersekongkol dengan India untuk mengatur kami, kami pun harus bergabung dengan rekan-rekan kami di seberang sana untuk melawan keduanya," kata Mir dari tempat persembunyiannya di Srinagar, ibu kota musim panas Kashmir. Dengan aksi protes itu, Mir dan para pendukungnya hendak mengatakan, rakyat Kashmir, baik yang ada di wilayah yang dikuasai Pakistan maupun di bagian India, tak mengakui pembagian Kashmir menjadi dua wilayah. Sudah sejak awal India dan Pakistan menganggap pawai unjuk kekuatan itu sebagai tindakan sangat berbahaya, mengingat suasana garis demarkasi sudah sangat tegang. Dua tahun silam India dan Pakistan hampir saja terjerumus ke dalam perang ketika kaum militan Kashmir di wilayah yang diduduki India berontak. Dalam serentetan kerusuhan antara kaum militan dan pemerintah India, tak kurang dari 6.500 jiwa orang Kashmir melayang. Sedangkan pasukan keamanan Pakistan telah menewaskan 15 orang militan. Sebelum itu, sejak kedua negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada 1947, keduanya telah terlibat dalam dua perang besar untuk memperebutkan Kashmir. Karena itulah, kedua pihak siap-siap mencegah terjadinya longmarch itu, apalagi sampai melanggar garis demarkasi. Ratusan tentara Pakistan dengan dilengkapi oleh alat-alat pengendalian huruhara sudah memblokade jalan ke arah perbatasan. "Melanggar perbatasan tanpa senjata sama saja dengan mengundang tentara India untuk menembak dan itu tak bedanya dengan bunuh diri," kata Sardar Abdul Qayyum, perdana menteri negara bagian Kashmir. Di pihak India, penjagaan agak

kurang ketat. Semua jalan dan celah yang menuju perbatasan dijaga dengan keras, dan jam malam pun diterapkan. Konon, karena ketatnya penjagaan di kedua sisi perbatasan itu iring-iringan yang sedianya diadakan pada Senin pekan ini terpaksa batal. Sebelum semangat bergabung dengan Pakistan oleh para militan Kashmir menjadi redup, dulu ciri utama perjuangan kemerdekaan rakyat Kashmir yang sebagian besar beragama Islam itu memang menjadikan Kashmir bagian dari Republik Pakistan. Tapi, mungkin belajar dari ketidakstabilan Pakistan sejak di bawah rezim Zia ul Haq dengan republik Islamnya, para pejuang Kashmir banting setir. Mendirikan negara sendiri yang bebas, merdeka, dan berdaulat sekarang menjadi impian mereka. Pada mulanya taktik gerilya yang diterapkan front Pembebasan sangat tak menyenangkan rakyat Kashmir. Karena pemerintah India sering mengadakan pembalasan yang lebih banyak meminta korban orang sipil. Tapi, karena para penguasa Kashmir sering mengandalkan pasukan paramiliter yang sering berbuat kejam terhadap penduduk sipil, sikap rakyat berbalik. Sekarang bahkan wanita dan anak-anak pun turut meneriakkan slogan Hame chahiye, azaadi (Kami ingin kemerdekaan). Sejak 1990 pula pergolakan di Kashmir penuh berlumuran darah dan diwarnai dengan taktik teror dari kedua pihak. Pemimpin tertinggi Front Pembebasan Jammu dan Kashmir, Amanullah Khan, sudah sejak tahun silam berada di bawah tahanan polisi India. Keinginan militan Kashmir untuk merdeka itu timbul juga karena sikap Pakistan yang tampaknya tidak tegas. Mungkin karena kekhawatiran terjadinya perang India-Pakistan, Karachi tidak tuntas dalam mendukung gerakan kemerdekaan Kashmir. Dalam dua perang memperebutkan Kashmir, tentara Pakistan dibikin babak belur. Repotnya lagi, Front Pembebasan hanyalah salah satu dari sekian banyak faksi yang berjuang untuk kemerdekaan, walaupun ia yang terbesar. Masih ada lagi kelompok yang lebih kecil, dan kelompok pro Pakistan. Yang terakhir ini berhimpun di bawah organisasi yang bernama Hizbul Mujahedin dan Kekuatan Janbaaz Muslim. Tapi, simpati rakyat makin lama makin pada kelompok Amanullah Khan, yang tadinya minoritas. Sekarang bahkan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif pun mulai condong ke pendapat untuk memberi kemerdekaan kepada Kashmir. Persoalannya sekarang, apakah India setuju. Dan walaupun Karachi dan New Delhi sudah satu kata, keadaan di Kashmir tak akan aman dengan sendirinya. Faksi-faksi yang begitu banyak itu sering saling bunuh. Gambaran tentang kekacauan itu dilukiskan oleh kata-kata Mir kepada wartawan India Today, "Kami punya dua musuh. Sekarang yang kami hadapi dulu adalah India . . . ." A. Dahana

Sumber:

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/04/11/LN/mbm.19920411.LN8854.id.html>